



Katalog: 4207002



KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN



BADAN PUSAT STATISTIK

**2020
-
2021**

**LAPORAN
INDEKS KHUSUS
PENANGANAN
STUNTING**



2020
-
2021

LAPORAN
INDEKS KHUSUS
PENANGANAN
STUNTING




LAPORAN INDEKS KHUSUS PENANGANAN *STUNTING* 2020-2021

No. Publikasi	04200.2305
Katalog	4207002
Ukuran Buku	18,2 cm x 25,7 cm
Jumlah Halaman	xviii + 87 halaman
Naskah	Badan Pusat Statistik
Penyunting	Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat
Desain Kover	Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat
Diterbitkan oleh	©Badan Pusat Statistik,
Sumber Ilustrasi	canva.com

<https://www.bps.go.id>

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik






TIM PENYUSUN

Badan Pusat Statistik

Margo Yuwono, Ateng Hartono, Ahmad Avenzora, Ida Eridawaty Harahap, Sapta Hastho Ponco, Siswi Puji Astuti, Amalia Noviani, Eva Yugiana, Hanin Rahma Septina, Hardianto, Ketut Krisna, Mayang Sari, Ririn Kuncaraning Sari, Rizqi Nafi' Syari'ati

Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia

Suprayoga Hadi, Abdul Mu'is, Iing Mursalin



<https://www.bps.go.id>



KATA PENGANTAR

BADAN PUSAT STATISTIK

Percepatan penurunan *stunting* merupakan salah satu program prioritas nasional pemerintah di bidang kesehatan. *Stunting* bukan hanya berdampak terhadap pertumbuhan fisik balita, tetapi juga pada fungsi penting tubuh lainnya, seperti perkembangan otak dan sistem kekebalan tubuh. Balita *stunting* berpotensi memiliki tingkat kecerdasan tidak maksimal, lebih rentan terhadap penyakit, dan di masa depan dapat berisiko pada menurunnya tingkat produktivitas.

Laporan Indeks Khusus Penanganan *Stunting* (IKPS) 2020-2021 merupakan tindak lanjut dari penyusunan IKPS yang telah disusun sebelumnya. Dalam laporan ini dilakukan penghitungan IKPS dengan metode yang telah disempurnakan, yaitu dengan perubahan 2 (dua) indikator pada dimensi perlindungan sosial. Pergantian indikator ini dilakukan atas dasar diskusi yang melibatkan para pakar.

Capaian IKPS tahun 2020 dan 2021 pada laporan ini disajikan pada level nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Penyusunan laporan ini dimaksudkan untuk memenuhi target *Disbursement Linked Indicators* (DLI) ke-8 tahun 2022 yang merupakan tanggung jawab Badan Pusat Statistik (BPS) bersama Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia (Setwapres RI) sesuai perjanjian kerja sama program *Investing in Nutrition and Early Years* (INEY) antara Pemerintah Indonesia dengan Bank Dunia.

Ucapan terima kasih diucapkan kepada para pakar di bidang gizi dan kesehatan masyarakat serta semua pihak yang telah memberi sumbangan dan masukan dalam penyusunan laporan ini. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi upaya percepatan penurunan *stunting* di Indonesia.

Jakarta, September 2022
Kepala Badan Pusat Statistik
Republik Indonesia



Margo Yuwono



KATA PENGANTAR

SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pembangunan secara serius telah dikerjakan pemerintah sejak kemerdekaan sampai saat ini. Ragam kemajuan pembangunan (ekonomi) telah banyak tercapai, misalnya pertumbuhan ekonomi, kenaikan pendapatan per kapita, perbaikan infrastruktur, perkembangan investasi, dan kemajuan pusat industri. Namun, di balik itu persoalan sosial ekonomi juga masih bertebaran di negeri ini, salah satunya adalah tengkes (*stunting*).

Problem tengkes ini akan menjadi beban pembangunan di masa mendatang jika tidak ditangani dengan sigap. Balita yang mengalami tengkes akan menjelma menjadi sumber daya insani yang kurang produktif di masa depan. Implikasinya, kualitas hidupnya akan memburuk dan kemajuan pembangunan secara berkelanjutan sukar diperoleh. Inilah yang menjadi alasan pokok pemerintah berjuang mengurangi tengkes secara sistematis.

Wakil Presiden memberikan perhatian serius terhadap perkara ini karena menyadari dampak yang ditimbulkan bila tengkes tidak tertangani dengan baik. Di samping itu, salah satu tugas negara yang diemban oleh Wakil Presiden Republik Indonesia adalah sebagai Ketua Pengarah Tim Percepatan Penurunan *Stunting*. Pemerintah membuat target sangat jelas: prevalensi tengkes di Indonesia mesti turun menjadi 14 persen pada 2024.

Oleh sebab itu, capaian intervensi penanganan tengkes oleh pemerintah diukur setiap tahun secara jelas, meliputi input, proses, hasil (*output*) dan dampak (*outcome*) dari setiap program. Pengukuran kinerja pada aspek input dan proses tidak kalah penting dibandingkan sisi hasil dan dampak sehingga tidak bisa diabaikan dalam pelaksanaannya.

Kerja besar ini mesti didekati secara teknokratis sehingga pemerintah membuat Indeks Khusus Penanganan *Stunting* (IKPS) yang dikembangkan sejak 2018 menjadi alat ukur kinerja program percepatan penurunan tengkes yang mencakup keempat aspek. Laporan penghitungan IKPS tersebut diharapkan dapat menuntun pemerintah dalam mengevaluasi intervensi penurunan tengkes yang telah diimplementasikan.

Hasil penghitungan IKPS sejak 2018 sampai 2021 menunjukkan hasil yang membaik (terus mengalami kenaikan). Diharapkan keberhasilan program dan kegiatan percepatan penurunan tengkes ini menjadi motivasi bagi semua pemangku kepentingan untuk bekerja lebih optimal lagi dalam rangka memastikan prevalensi tengkes di Indonesia berkurang menjadi 14 persen pada 2024.

Akhirnya, saya menyampaikan selamat dan terima kasih kepada tim dari Sekretariat Wakil Presiden dan Badan Pusat Statistik yang telah bekerja sama dalam menyusun Laporan Indeks Khusus Penanganan *Stunting* 2020-2021. Saya juga menyampaikan penghargaan kepada para pakar serta perwakilan Kementerian dan Lembaga yang telah memberikan masukan yang amat berharga dalam proses penghitungan IKPS. Hal ini merupakan bagian dari jejak kerja yang vital dan berfaedah bagi bangsa.

Ke depan, saya mendukung IKPS dapat terus disempurnakan sehingga menjadi panduan yang lebih layak bagi Wakil Presiden dalam mengarahkan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah merumuskan kebijakan yang solid sekaligus perbaikan pelaksanaan program sebagai jawaban atas aneka soal terkait percepatan penurunan tengkes di Indonesia. Pekerjaan rumah masih banyak yang menanti, semoga ikhtiar ini tidak pernah berhenti sebagai wujud bakti kepada negeri.

Jakarta, September 2022

Kepala Sekretariat Wakil Presiden
Republik Indonesia



Ahmad Erari Yustika



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR BADAN PUSAT STATISTIK.....	v
KATA PENGANTAR SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan.....	3
1.3 Manfaat.....	4
BAB 2 METODOLOGI PENYUSUNAN IKPS YANG DISEMPURNAKAN.....	5
2.1 Perubahan Indikator Penyusun IKPS.....	5
2.2 Konsep dan Definisi Indikator Penyusun IKPS yang Disempurnakan.....	7
2.3 Sumber Data.....	17
2.4 Normalisasi Indikator.....	18
2.5 Penimbang Dimensi.....	20
2.6 <i>Relative Standard Error</i>	20
2.7 <i>Confidence Interval</i>	21
2.8 Diagram Sankey.....	21
BAB 3 INDEKS KHUSUS PENANGANAN <i>STUNTING</i>.....	23
3.1 IKPS Nasional.....	23
3.2 IKPS Provinsi.....	26
3.3 IKPS Kabupaten/Kota.....	32
DAFTAR PUSTAKA.....	41
LAMPIRAN.....	43



DAFTAR TABEL

Bab 2 Metodologi Penyusunan IKPS yang Disempurnakan

Tabel 2.1	Dimensi dan Indikator dalam IKPS yang Disempurnakan	6
Tabel 2.2	Nilai Minimal dan Maksimal Indikator Penyusun IKPS.....	19
Tabel 2.3	Penimbang Dimensi Penyusun IKPS.....	20

Bab 3 Indeks Khusus Penanganan *Stunting*

Tabel 3.1	Indeks Dimensi dan Indikator Penyusun IKPS, 2020-2021	25
Tabel 3.2	Indeks Dimensi dan Indikator Penyusun IKPS Provinsi DKI Jakarta, 2020-2021	31
Tabel 3.3	Jumlah dan Nama Kabupaten/Kota dengan RSE Kurang dari 25 Persen untuk Seluruh Indikator Penyusun IKPS Tahun 2020-2021.....	32
Tabel 3.4	Indeks Dimensi dan Indikator Penyusun IKPS Kota Balikpapan, 2020- 2021	38



DAFTAR GAMBAR

Bab 3 Indeks Khusus Penanganan *Stunting*

Gambar 3.1	IKPS Nasional Menurut Dimensi, 2018-2021	24
Gambar 3.2	IKPS Menurut Provinsi, 2020-2021.....	27
Gambar 3.3	Transisi IKPS Provinsi, 2020-2021	29
Gambar 3.4	IKPS Provinsi DKI Jakarta Menurut Dimensi, 2018-2021	30
Gambar 3.5	Transisi IKPS Kabupaten/Kota, 2020-2021	35
Gambar 3.6	IKPS Kota Balikpapan Menurut Dimensi, 2020-2021	37

<https://www.bps.go.id>



DAFTAR LAMPIRAN

IKPS Tingkat Nasional

Lampiran 1.1	Capaian IKPS Menurut Komponen Penyusun, 2018-2021	45
--------------	---	----

IKPS Tingkat Provinsi

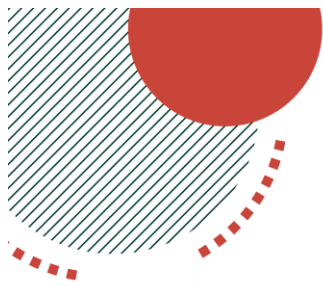
Lampiran 2.1	Capaian IKPS Provinsi Aceh Menurut Komponen Penyusun, 2018-2021	46
Lampiran 2.2	Capaian IKPS Provinsi Sumatera Utara Menurut Komponen Penyusun, 2018-2021	47
Lampiran 2.3	Capaian IKPS Provinsi Sumatera Barat Menurut Komponen Penyusun, 2018-2021	48
Lampiran 2.4	Capaian IKPS Provinsi Riau Menurut Komponen Penyusun, 2018-2021	49
Lampiran 2.5	Capaian IKPS Provinsi Jambi Menurut Komponen Penyusun, 2018-2021	50
Lampiran 2.6	Capaian IKPS Provinsi Sumatera Selatan Menurut Komponen Penyusun, 2018-2021	51
Lampiran 2.7	Capaian IKPS Provinsi Bengkulu Menurut Komponen Penyusun, 2018-2021	52
Lampiran 2.8	Capaian IKPS Provinsi Lampung Menurut Komponen Penyusun, 2018-2021	53
Lampiran 2.9	Capaian IKPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Menurut Komponen Penyusun, 2018-2021	54
Lampiran 2.10	Capaian IKPS Provinsi Kepulauan Riau Menurut Komponen Penyusun, 2018-2021	55
Lampiran 2.11	Capaian IKPS Provinsi DKI Jakarta Menurut Komponen Penyusun, 2018-2021	56
Lampiran 2.12	Capaian IKPS Provinsi Jawa Barat Menurut Komponen Penyusun, 2018-2021	57
Lampiran 2.13	Capaian IKPS Provinsi Jawa Tengah Menurut Komponen Penyusun, 2018-2021	58
Lampiran 2.14	Capaian IKPS Provinsi DI Yogyakarta Menurut Komponen Penyusun, 2018-2021	59
Lampiran 2.15	Capaian IKPS Provinsi Jawa Timur Menurut Komponen Penyusun, 2018-2021	60
Lampiran 2.16	Capaian IKPS Provinsi Banten Menurut Komponen Penyusun, 2018-2021	61

Lampiran 2.17	Capaian IKPS Provinsi Bali Menurut Komponen Penyusun, 2018-2021	62
Lampiran 2.18	Capaian IKPS Provinsi Nusa Tenggara Barat Menurut Komponen Penyusun, 2018-2021	63
Lampiran 2.19	Capaian IKPS Provinsi Nusa Tenggara Timur Menurut Komponen Penyusun, 2018-2021	64
Lampiran 2.20	Capaian IKPS Provinsi Kalimantan Barat Menurut Komponen Penyusun, 2018-2021	65
Lampiran 2.21	Capaian IKPS Provinsi Kalimantan Tengah Menurut Komponen Penyusun, 2018-2021	66
Lampiran 2.22	Capaian IKPS Provinsi Kalimantan Selatan Menurut Komponen Penyusun, 2018-2021	67
Lampiran 2.23	Capaian IKPS Provinsi Kalimantan Timur Menurut Komponen Penyusun, 2018-2021	68
Lampiran 2.24	Capaian IKPS Provinsi Kalimantan Utara Menurut Komponen Penyusun, 2018-2021	69
Lampiran 2.25	Capaian IKPS Provinsi Sulawesi Utara Menurut Komponen Penyusun, 2018-2021	70
Lampiran 2.26	Capaian IKPS Provinsi Sulawesi Tengah Menurut Komponen Penyusun, 2018-2021	71
Lampiran 2.27	Capaian IKPS Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Komponen Penyusun, 2018-2021	72
Lampiran 2.28	Capaian IKPS Provinsi Sulawesi Tenggara Menurut Komponen Penyusun, 2018-2021	73
Lampiran 2.29	Capaian IKPS Provinsi Gorontalo Menurut Komponen Penyusun, 2018-2021	74
Lampiran 2.30	Capaian IKPS Provinsi Sulawesi Barat Menurut Komponen Penyusun, 2018-2021	75
Lampiran 2.31	Capaian IKPS Provinsi Maluku Menurut Komponen Penyusun, 2018-2021	76
Lampiran 2.32	Capaian IKPS Provinsi Maluku Utara Menurut Komponen Penyusun, 2018-2021	77
Lampiran 2.33	Capaian IKPS Provinsi Papua Barat Menurut Komponen Penyusun, 2018-2021	78
Lampiran 2.34	Capaian IKPS Provinsi Papua Menurut Komponen Penyusun, 2018-2021	79
Lampiran 2.35	Kategori IKPS Menurut Provinsi, 2020-2021	80

IKPS Tingkat Kabupaten/Kota

Lampiran 3.1	Capaian IKPS Kabupaten/Kota dengan RSE Kurang dari 25 Persen untuk Seluruh Indikator Penyusun IKPS Tahun 2020-2021, 2020-2021.....	81
Lampiran 3.2	Capaian IKPS Kota Balikpapan Menurut Komponen Penyusun, 2020-2021.....	86
Lampiran 3.3	Capaian IKPS Kabupaten Mahakam Hulu Menurut Komponen Penyusun, 2020-2021.....	87

<https://www.bps.go.id>



BAB I

PENDAHULUAN

“Pelaksanaan program harus dipantau, dievaluasi, dan dilaporkan secara terpadu dan berkala. Sehingga dapat diketahui perkembangan, capaian, dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya, yang kemudian kita bisa mengambil langkah berikutnya untuk memastikan target prevalensi 14% pada tahun 2024 bisa dicapai.”

- Wakil Presiden RI K.H. Ma’ruf Amin pada Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Pusat tanggal 11 Mei 2022 -

1.1 Latar Belakang

Percepatan penurunan *stunting* pada anak balita merupakan salah satu agenda utama pemerintah. Di tengah upaya menghadapi pandemi yang disebabkan *the Novel Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19), pemerintah tetap membuktikan komitmennya untuk mengatasi permasalahan *stunting* di Indonesia. Hal ini terlihat dari dikeluarkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*. Pemerintah memandang bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, serta pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) khususnya pada Tujuan 2, yaitu menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan, perlu dilakukan percepatan penurunan *stunting*. Hal ini tidak terlepas dari dampak negatif *stunting* dan kekurangan gizi lainnya yang terjadi pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yang di samping berisiko menghambat pertumbuhan fisik dan menyebabkan kerentanan anak terhadap penyakit, juga menghambat perkembangan kognitif yang akan berpengaruh pada tingkat kecerdasan dan produktivitas anak di masa depan (Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia dan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 2019).

.....

Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

.....

Untuk mendukung pelaksanaan percepatan penurunan *stunting*, pemerintah telah menetapkan Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting*. Hal ini merupakan salah satu langkah penting dalam upaya untuk mencapai target nasional prevalensi *stunting* pada tahun 2024 sebesar 14 persen, sebagaimana terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

.....
*Berdasarkan hasil
Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021,
prevalensi stunting balita
menunjukkan penurunan dari
27,7 persen pada tahun 2020 menjadi
24,4 persen pada tahun 2021.*
.....

Percepatan penurunan *stunting* di Indonesia dilaksanakan melalui intervensi spesifik dan intervensi sensitif yang diselenggarakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan. Intervensi spesifik difokuskan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya *stunting*, dan sebaliknya, intervensi sensitif difokuskan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya *stunting*.

Untuk mengetahui pencapaian dari berbagai upaya percepatan penurunan *stunting*, dibutuhkan suatu instrumen evaluasi. Indeks Khusus Penanganan *Stunting* (IKPS) merupakan salah satu instrumen yang disusun untuk mengukur kinerja pelaksanaan program percepatan penurunan *stunting* di tingkat nasional hingga tingkat kabupaten/kota. Selain IKPS, terdapat instrumen lain yang juga digunakan untuk mengevaluasi kinerja pelaksanaan program, yaitu Survei Status Gizi tahunan yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan untuk mengetahui prevalensi *stunting* balita di Indonesia serta evaluasi kinerja pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui pemerintah provinsi.

Selain sebagai salah satu instrumen evaluasi, penyusunan IKPS juga dimaksudkan untuk memenuhi *Dirbursement Linked Indicators* (DLI) 8 dari Program *Investing in Nutrition and Early Years* (INEY) yang merupakan perjanjian kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Bank Dunia. IKPS pertama kali disusun menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2017. Pada tahun 2020, dilakukan penyempurnaan penghitungan IKPS dengan menggunakan data Susenas Maret 2018-2019. Selanjutnya, pada tahun 2022, kembali dilakukan penyempurnaan metode penghitungan IKPS dengan pertimbangan pemilihan indikator yang lebih sensitif dalam menggambarkan kinerja percepatan penurunan *stunting* di Indonesia. Pada penyempurnaan ini, dilakukan perubahan indikator pada dimensi perlindungan sosial, yaitu dari pemanfaatan jaminan kesehatan dan penerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) menjadi kepemilikan Jaminan Kesejahteraan Nasional (JKN)/jaminan kesehatan daerah (jamkesda) dan penerima KPS/KKS atau bantuan pangan. Dengan adanya perubahan indikator ini, pada tahun 2022

Badan Pusat Statistik (BPS) dan Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia (Setwapres RI) tidak hanya melakukan penghitungan IKPS untuk tahun 2021, namun juga untuk tahun 2018 hingga tahun 2020.

Secara umum, rangkaian penghitungan IKPS tidak mengalami perubahan, yaitu dimulai dari pemetaan indikator kandidat penyusun IKPS, normalisasi indikator, penentuan penimbang, hingga penghitungan IKPS itu sendiri. Dalam setiap tahapannya, BPS dan Setwapres RI tidak hanya bekerja sendiri, namun juga melibatkan Kementerian/Lembaga dan para pakar. Dengan adanya masukan dari Kementerian/Lembaga dan para pakar di bidang kesehatan, gizi, pendidikan, dan sebagainya, diperoleh masukan bagi metode penghitungan IKPS baik dari segi pemilihan indikator, metodologi, hingga pengukuran indeks tersebut.

Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, IKPS disajikan baik pada level nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota. Berbeda dengan tahun sebelumnya yang hanya menyajikan IKPS untuk kabupaten/kota dengan *Relative Standard Error* (RSE) seluruh indikator penyusun IKPS kurang dari 25 persen, pada tahun 2021 disajikan capaian IKPS untuk seluruh kabupaten/kota dengan catatan pada indikator dengan RSE sebesar 25 persen atau lebih. Jika RSE indikator penyusun IKPS 25 persen hingga 50 persen, pengguna data harus berhati-hati dalam menggunakan indikator tersebut. Adapun jika RSE indikator penyusun IKPS lebih dari 50 persen, maka nilai indikator dianggap tidak akurat. Selain itu juga dilakukan penghitungan *confidence interval* bagi masing-masing indikator, dimensi, serta IKPS pada level kabupaten/kota.

Daftar lengkap capaian IKPS seluruh kabupaten/kota yang dilengkapi dengan *confidence interval* terdapat dalam Laporan Indeks Khusus Penanganan *Stunting* Kabupaten/Kota 2020-2021. Adapun pada laporan ini, capaian IKPS level kabupaten/kota tahun 2020-2021 yang disajikan hanya untuk kabupaten/kota dengan RSE seluruh indikator penyusun IKPS tahun 2020-2021 kurang dari 25 persen.

1.2 Tujuan

Dalam rangka melakukan *monitoring* atas program percepatan penurunan *stunting* yang telah berjalan, diperlukan sebuah instrumen khusus yang dapat mengukur sejauh mana rumah tangga sasaran telah menerima berbagai intervensi. Instrumen khusus berupa IKPS ini disusun dengan tujuan agar dapat digunakan untuk membandingkan bagaimana perkembangan cakupan-cakupan intervensi terhadap rumah tangga sasaran, baik secara nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota.

Laporan Indeks Khusus Penanganan *Stunting* 2020-2021 disusun dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan data dan informasi bagi pemerintah dalam memantau kinerja penanganan *stunting* di Indonesia. Laporan ini diharapkan dapat menjelaskan manfaat IKPS

untuk Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah, serta dapat menyediakan berbagai informasi yang dibutuhkan dalam perancangan kebijakan penanganan *stunting* di Indonesia.

1.3 Manfaat

Manfaat IKPS tidak hanya dirasakan oleh Kementerian/Lembaga di tingkat pusat, namun juga dapat digunakan oleh pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan IKPS merupakan bagian dari *monitoring* dan evaluasi, yaitu merupakan salah satu indeks yang bisa dipantau secara periodik untuk melihat implementasi dari program penanganan *stunting*. IKPS dapat menjembatani kepentingan Kementerian/Lembaga dalam pelaksanaan penanganan *stunting*. Di lain pihak, IKPS secara tidak langsung juga dapat mencerminkan variasi pelaksanaan program penanganan *stunting* yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

<https://www.bps.go.id>



BAB 2

METODOLOGI PENYUSUNAN IKPS YANG DISEMPURNAKAN

2.1 Perubahan Indikator Penyusun IKPS

IKPS pertama kali disusun pada tahun 2018 dengan menggunakan data Susenas Maret 2017. Selanjutnya dilakukan penyempurnaan IKPS pada tahun 2020 dengan menggunakan data Susenas Maret 2018-2019. Upaya yang dilakukan dalam rangka penyempurnaan IKPS mencakup peninjauan kembali terhadap indikator dan dimensi penyusun IKPS tahun 2017 melalui studi pustaka dan diskusi bersama para pakar. Penyempurnaan dilakukan baik dari aspek indikator yang digunakan, metodologi, dan penyajian laporan.

IKPS yang disempurnakan memuat 6 (enam) dimensi dan 12 variabel atau lebih banyak daripada yang dipakai pada IKPS tahun 2017. Penambahan dimensi dan indikator ini bertujuan agar IKPS dapat lebih mampu memotret upaya-upaya yang telah dilakukan dalam penanganan *stunting*. Jika IKPS tahun 2017 dibentuk dari 5 (lima) dimensi, maka pada IKPS yang disempurnakan ditambahkan 1 (satu) dimensi yaitu pendidikan dengan indikator yang dipakai adalah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Diikutsertakannya dimensi pendidikan dalam IKPS didasarkan pada Indikator Pelayanan Gizi Konvergen yang disusun Bank Dunia. Dari 8 (delapan) indikator pelayanan, hanya indikator pendidikan yang belum masuk dalam IKPS 2017. Dimasukkannya indikator PAUD dalam IKPS juga sesuai dengan kerangka kerja INEY yang menyebutkan bahwa perkembangan anak usia dini (*Early Childhood Development/ECD*) masuk sebagai salah satu *underlying determinant* yang berpengaruh terhadap penanganan *stunting*.

Indikator penyusun IKPS tahun 2018-2019 juga digunakan dalam penyusunan IKPS tahun 2020. Namun demikian pada rangkaian kegiatan penyusunan IKPS tahun 2021, diputuskan akan kembali dilakukan penyempurnaan penghitungan IKPS. Pada rapat yang dilaksanakan pada tanggal 3 Juni 2022 yang dihadiri perwakilan dari BPS, Setwapres RI, Kementerian/Lembaga, Bank Dunia, dan para pakar, diputuskan adanya penggantian 2 (dua) indikator pada dimensi perlindungan sosial, yaitu dari pemanfaatan jaminan kesehatan dan penerima KPS/KKS menjadi kepemilikan JKN/jamkesda dan penerima KPS/KKS atau bantuan pangan. Secara lengkap, indikator dan dimensi penyusun IKPS disajikan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Dimensi dan Indikator dalam IKPS yang Disempurnakan

Dimensi/Indikator (1)	Keterangan (2)
Dimensi kesehatan	
Imunisasi	Persentase anak usia 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap
Penolong persalinan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan	Persentase Perempuan Pernah Kawin (PPK) usia 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih di fasilitas kesehatan
Keluarga Berencana (KB) modern	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang aktif secara seksual dan ingin menunda untuk memiliki anak atau tidak ingin menambah anak lagi dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern
Dimensi gizi	
ASI eksklusif	Persentase bayi usia kurang dari 6 (enam) bulan yang mendapatkan ASI eksklusif
Makanan Pendamping (MP) ASI	Persentase anak usia 6-23 bulan yang mendapatkan makanan pendamping ASI
Dimensi perumahan	
Air minum layak	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak
Sanitasi layak	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan
Dimensi pangan	
Mengalami kerawanan pangan	Prevalensi penduduk yang mengalami kerawanan pangan sedang atau parah (<i>Food Insecurity Experience Scale (FIES)</i>)
Ketidacukupan konsumsi pangan	Prevalensi populasi yang tidak mengalami kecukupan konsumsi pangan (<i>Prevalence of Undernourishment (PoU)</i>)
Dimensi pendidikan	
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD 3-6 tahun
Dimensi perlindungan sosial	
Kepemilikan JKN/jamkesda	Persentase penduduk yang memiliki JKN/Jamkesda
Penerima KPS/KKS atau bantuan pangan	Persentase rumah tangga yang menerima KPS/KKS atau bantuan pangan (penduduk 40 persen terbawah)

Secara spesifik, penggantian 2 (dua) indikator pada dimensi perlindungan sosial didasari pertimbangan sebagai berikut:

- a. Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan bisa saja tidak memanfaatkan jaminan kesehatan yang dimiliki karena tidak mempunyai keluhan kesehatan. Oleh karena itu, diputuskan adanya penggantian indikator pemanfaatan jaminan kesehatan menjadi indikator kepemilikan JKN/jamkesda. Di sisi lain, indikator cakupan kepesertaan JKN juga merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur peningkatan perlindungan sosial bagi seluruh penduduk dalam RPJMN 2020-2024. Pada level global pun, indikator

ini digunakan dalam mengukur pencapaian Target 3.8 dalam SDGs, yaitu mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang. Kaitan antara kepemilikan jaminan kesehatan dan *stunting* pun telah dibuktikan melalui berbagai penelitian, salah satunya yang dilakukan oleh Nshakira-Rukundo et al. (2020).

- b. Penambahan komponen bantuan pangan pada indikator penerima Kartu KPS/KKS didasari adanya mekanisme alternatif penyaluran bantuan pangan yaitu melalui pemberian bantuan secara tunai, dan tidak melalui KKS. Di sisi lain, jumlah keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial pangan juga merupakan salah satu indikator sasaran dalam mengukur tersedianya layanan intervensi sensitif, sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*.

2.2 Konsep dan Definisi Indikator Penyusun IKPS yang Disempurnakan

Berikut adalah definisi dari masing-masing indikator penyusun IKPS yang disempurnakan:

a. Dimensi kesehatan

Dimensi kesehatan terdiri dari 3 (tiga) indikator, yaitu imunisasi, penolong persalinan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan, dan Keluarga Berencana (KB) modern.

1. Imunisasi

Indikator imunisasi yang digunakan adalah persentase anak usia 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap. Anak usia 12-23 bulan dikatakan menerima imunisasi dasar lengkap jika sudah menerima 1 (satu) kali imunisasi BCG, 3 (tiga) kali imunisasi DPT, 3 (tiga) kali imunisasi polio, 1 (satu) kali imunisasi campak, dan 3 (tiga) kali imunisasi hepatitis. Persentase anak usia 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap adalah perbandingan antara banyaknya anak usia 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap dengan banyaknya anak usia 12-23 bulan.

Pemberian imunisasi dasar lengkap pada anak dipengaruhi oleh beberapa aspek, yaitu sebagai berikut:

- Kebudayaan/agama setempat yang melarang pemberian imunisasi bagi anak, misalnya saja adanya pendapat di masyarakat yang menyatakan bahwa imunisasi haram, imunisasi dapat membuat anak sakit, dll.
- Pengetahuan ibu, dimana ibu dengan pemahaman bahwa imunisasi dapat menghindarkan anak dari penyakit, cenderung akan memastikan anak menerima imunisasi dasar lengkap.

- Dukungan keluarga, dimana keluarga yang mendukung pemberian imunisasi untuk menghindarkan anak dari penyakit, cenderung akan mendorong lengkapnya pemberian imunisasi dasar lengkap pada anak.
- Dukungan tenaga kesehatan, dimana tenaga kesehatan merupakan garda terdepan dalam pelaksanaan program imunisasi di masyarakat.
- Pelayanan imunisasi, yang meliputi ketersediaan sarana dan prasarana, jarak, serta waktu tempuh dari tempat tinggal ke lokasi penyedia layanan imunisasi.

2. Penolong persalinan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan

Indikator yang digunakan adalah persentase PPK usia 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan. Tenaga kesehatan yang dimaksud adalah dokter kandungan, dokter umum, bidan, dan perawat. Adapun yang dimaksud dengan fasilitas kesehatan adalah RS pemerintah/RS swasta/RS ibu dan anak, rumah bersalin/klinik, puskesmas, puskesmas pembantu (pustu), praktik tenaga kesehatan, serta polindes/poskesdes. Penolong persalinan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan dipengaruhi oleh beberapa aspek, yaitu sebagai berikut:

- Pengetahuan, yaitu pengetahuan ibu mengenai peluang terjadinya komplikasi persalinan yang dapat meningkatkan risiko kematian jika tidak ditangani oleh tenaga kesehatan.
- Faktor adat, budaya, dan agama, misalnya adanya pendapat bahwa ibu yang melahirkan hanya boleh ditolong oleh tenaga kesehatan berjenis kelamin perempuan.
- Nilai di masyarakat, misalnya masih ada anggapan bahwa melahirkan ditolong bidan atau dukun sama saja karena apabila ibu meninggal saat melahirkan, maka akan tergolong syahid.
- Tradisi atau kebiasaan dari pendahulu (misal nenek atau ibu) yang melahirkan dengan ditolong oleh dukun bayi.
- Tenaga kesehatan yang meliputi jumlah dan kapasitas tenaga kesehatan, dimana tidak semua layanan kesehatan memiliki bidan.
- Layanan kesehatan yang meliputi jarak dan waktu tempuh, kondisi bangunan, kondisi ruangan, kelengkapan dan kondisi peralatan, dll.
- Biaya, dimana biaya melahirkan di rumah lebih kecil dibandingkan biaya melahirkan di fasilitas kesehatan. Apabila melahirkan di fasilitas kesehatan, ibu harus mengeluarkan berbagai biaya, antara lain biaya pertolongan persalinan, obat, biaya pelayanan, biaya transportasi ke tempat pelayanan kesehatan, dll.

3. Keluarga Berencana (KB) modern

Indikator Keluarga Berencana (KB) modern yang digunakan adalah proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang aktif secara seksual dan ingin menunda untuk memiliki anak atau tidak ingin menambah anak lagi dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern. Yang termasuk alat kontrasepsi metode modern adalah sterilisasi wanita/tubektomi/Medis Operatif Wanita (MOW), sterilisasi pria/vasektomi/Medis Operatif Pria (MOP), *Intrauterine Device* (IUD)/Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR)/spiral, suntikan, susuk KB/implan, pil, kondom pria/karet KB, dan intravag/kondom wanita/diafragma.

Penggunaan alat KB modern dipengaruhi oleh berbagai aspek, yaitu sebagai berikut:

- Masih adanya kepercayaan bahwa “banyak anak banyak rezeki”, terutama pada masyarakat yang masih memegang tradisi lama. Pada masyarakat di daerah perdesaan yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani, banyaknya anak akan membantu proses pekerjaan di bidang pertanian tersebut.
- Kepercayaan masyarakat bahwa program KB dilarang oleh agama. Mereka berpendapat bahwa perilaku menunda atau tidak ingin memiliki anak merupakan perbuatan yang menolak atau tidak mensyukuri rezeki dari Tuhan.
- Pola pikir masyarakat yang tidak ingin direpotkan dengan program KB. Hal ini dikarenakan program KB membutuhkan kedisiplinan dari penggunanya. Pengguna KB harus teratur dan disiplin dalam melaksanakan aturan dari program tersebut sesuai dengan cara KB yang digunakan.
- Pola pikir perempuan yang menganggap bahwa alat kontrasepsi misal pil KB dapat menyebabkan gangguan kesehatan (misal pusing) dan penambahan berat badan.
- Kurang memadainya fasilitas. Hal ini dapat menghambat kelancaran pelaksanaan kegiatan program KB.
- Sosialisasi program KB oleh Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB). Sosialisasi dapat berupa penyuluhan mengenai manfaat dan pentingnya KB kepada masyarakat melalui pendekatan berbagai tokoh masyarakat (misal tokoh agama dan aparat pemerintah desa).
- Kurangnya jumlah PKB dan PLKB di tingkat kecamatan.
- Kurang sejalannya kampanye dan akses masyarakat untuk memperoleh alat KB. Walaupun kampanye KB mandiri cukup gencar, namun masyarakat belum dapat membeli alat kontrasepsi di seluruh apotek dan toko obat.

b. Dimensi gizi

Dimensi gizi terdiri dari 2 (dua) indikator, yaitu ASI eksklusif dan makanan pendamping (MP) ASI.

4. ASI eksklusif

Indikator ASI eksklusif yang digunakan adalah persentase bayi usia kurang dari 6 (enam) bulan yang mendapatkan ASI eksklusif. Sebagaimana terdapat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, ASI eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, tanpa menambahkan dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman lain. Pada penghitungan IKPS, bayi berusia kurang dari 6 (enam) bulan dikatakan mendapatkan ASI eksklusif jika bayi saat ini masih diberi ASI dan sejak lahir sampai 24 jam terakhir hanya mendapat ASI saja dan tidak pernah diberi minuman (cairan) atau makanan selain ASI.

Pemberian ASI Eksklusif dipengaruhi oleh berbagai aspek, yaitu sebagai berikut:

- Pengetahuan ibu tentang ASI eksklusif yaitu ASI dalam jumlah cukup merupakan makanan terbaik dan dapat memenuhi kebutuhan gizi bayi selama 6 (enam) bulan pertama.
- Dukungan keluarga, misalnya dukungan suami dan orang tua terkait pemberian ASI saja kepada bayi selama 6 (enam) bulan, kebiasaan pemberian ASI eksklusif yang sudah dilakukan secara turun temurun, dll.
- Jenis persalinan, dimana ibu yang melahirkan secara normal memiliki kecenderungan untuk memberikan ASI eksklusif dibanding ibu yang melahirkan secara caesar.
- Terjadi pemisahan ibu dan bayi sesaat setelah dilahirkan.
- Kondisi ibu dimana ASI belum keluar ataupun produksi ASI masih sedikit.
- Perilaku Inisiasi Menyusu Dini (IMD) sesaat setelah melahirkan yang merupakan salah satu faktor kesuksesan pemberian ASI eksklusif.
- Tawaran pemberian susu formula oleh keluarga atau tenaga kesehatan.
- Ibu bekerja terutama di sektor informal yang cenderung tidak dapat memberikan ASI eksklusif karena tidak adanya ruang laktasi.
- Pola pikir yang salah dari perempuan bahwa memberikan ASI kepada anak dapat menyebabkan payudara "turun".

5. Makanan Pendamping (MP) ASI

Indikator makanan pendamping (MP) ASI yang digunakan adalah persentase anak usia 6-23 bulan yang mendapatkan makanan pendamping ASI. Makanan pendamping ASI (MP-ASI) adalah makanan atau minuman yang mengandung zat

gizi, diberikan kepada anak yang berusia 6-23 bulan guna memenuhi kebutuhan gizi selain dari ASI. Bayi usia 6-23 bulan dikatakan mendapatkan makanan pendamping jika dalam 24 jam terakhir, bayi tersebut makan/minum minimal 1 (satu) dari beberapa jenis makanan/minuman yang disebutkan dalam kuesioner yang digunakan dalam pengumpulan data di lapangan.

Pemberian MP-ASI dipengaruhi oleh berbagai aspek, yaitu sebagai berikut:

- Pengetahuan ibu tentang pentingnya memberikan MP-ASI yang beragam.
- Dukungan keluarga, misalnya dukungan suami dan orang tua terkait pemberian MP-ASI, kebiasaan pemberian MP-ASI yang sudah dilakukan secara turun temurun, dll
- Pendapatan, dimana rumah tangga dengan pendapatan yang cukup, memiliki kemungkinan untuk memberikan MP-ASI yang lebih beragam.
- Ketersediaan bahan makanan yang beragam di sekitar tempat tinggal.
- Dukungan tenaga kesehatan untuk menyampaikan informasi mengenai MP-ASI.
- Gencarnya kampanye MP-ASI instan. Hal ini menyebabkan ibu lebih memilih jenis MP-ASI ini karena lebih praktis dan tidak merepotkan.

c. Dimensi perumahan

Dimensi perumahan terdiri dari 2 (dua) indikator, yaitu air minum layak dan sanitasi layak.

6. Air minum layak

Indikator air minum layak yang digunakan adalah persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak. Rumah tangga dikatakan memiliki akses air minum layak yaitu jika sumber air minum utama yang digunakan adalah leding, air terlindungi, dan air hujan. Air terlindungi mencakup sumur bor/pompa, sumur terlindung, dan mata air terlindung. Bagi rumah tangga yang menggunakan sumber air minum berupa air kemasan, maka rumah tangga dikategorikan memiliki akses air minum layak jika sumber air untuk mandi/cuci berasal dari leding, sumur bor/pompa, sumur terlindung, mata air terlindung, dan air hujan.

Kepemilikan akses terhadap layanan sumber air minum layak dipengaruhi oleh berbagai aspek, yaitu sebagai berikut:

- Pengetahuan masyarakat tentang penggunaan sumber air minum layak dan terjamin kualitasnya yang dapat menghindarkan masyarakat dari gangguan kesehatan seperti diare, kolera, dan penyakit lainnya yang menular lewat air.

- Status ekonomi masyarakat, dimana status ekonomi yang tinggi membuat sumber air yang berkualitas menjadi terjangkau. Di sisi lain, pendapatan yang rendah membuat masyarakat mencari pengganti sumber air dengan kualitas yang lebih rendah.
- Tipe daerah tempat tinggal, dimana masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mendapatkan air minum yang layak dibanding mereka yang tinggal di daerah perdesaan. Hal ini dikarenakan daerah perkotaan memiliki teknologi yang lebih canggih dan fasilitas yang lebih lengkap dibandingkan dengan daerah perdesaan. Walaupun demikian, banyak ditemui daerah perdesaan yang masih mempunyai sumber air alami yang layak dikonsumsi.
- Kelangkaan air rumah tangga yang mengakibatkan sumber air minum yang digunakan rumah tangga juga menjadi kurang layak.

7. Sanitasi layak

Indikator sanitasi layak yang digunakan adalah persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan. Rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak adalah rumah tangga yang memiliki fasilitas tempat Buang Air Besar (BAB) yang digunakan sendiri, bersama rumah tangga tertentu (terbatas), atau di MCK komunal, menggunakan jenis kloset leher angsa, dan tempat pembuangan akhir tinja di tangki septik atau IPAL atau bisa juga di lubang tanah jika wilayah tempat tinggalnya di perdesaan.

Kepemilikan akses terhadap sanitasi layak dipengaruhi oleh berbagai aspek, yaitu sebagai berikut:

- Status ekonomi masyarakat, dimana masyarakat dengan tingkat ekonomi tinggi lebih mungkin untuk mengakses fasilitas sanitasi layak dibandingkan masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah.
- Pengetahuan masyarakat, dimana masyarakat umumnya hanya mengetahui bahwa BAB di sembarang tempat tidak baik untuk dilakukan. Namun demikian, mereka tidak mengetahui bagaimana kondisi sanitasi yang layak dan memenuhi persyaratan kesehatan.
- Ketersediaan air bersih yang merupakan faktor pendorong perilaku hidup sehat dan kepemilikan jamban yang sehat. Tersedianya air bersih akan memungkinkan seseorang untuk lebih menjaga kebersihan diri.
- Dukungan tenaga kesehatan. Peran tenaga kesehatan sangat penting dalam mendorong rumah tangga untuk memiliki jamban sehat di rumah. Dorongan dapat berupa motivasi, penyuluhan, pemberdayaan, ataupun pendampingan teknis.

- Dukungan aparat desa, tokoh masyarakat dan tokoh agama. Kedudukan yang tinggi di masyarakat menyebabkan ucapan, anjuran, dan instruksi dari tokoh-tokoh tersebut diperhatikan dan diikuti oleh masyarakat setempat.
- Kebiasaan masyarakat BAB sembarangan. Hal ini dapat disebabkan berbagai hal, misalnya saja karena merasa nyaman melakukan BAB di sembarang tempat, menganggap BAB di sungai lebih praktis, dll.

d. Dimensi pangan

Dimensi pangan terdiri dari 2 (dua) indikator, yaitu mengalami kerawanan pangan dan ketidakcukupan konsumsi pangan.

8. Mengalami kerawanan pangan

Indikator yang digunakan adalah prevalensi penduduk yang mengalami kerawanan pangan sedang atau parah (*Food Insecurity Experience Scale (FIES)*). FIES merupakan matriks pengalaman keparahan kerawanan pangan yang bergantung pada tanggapan langsung responden terhadap pertanyaan tentang akses mereka terhadap makanan yang memadai untuk melihat kemampuan mengakses/mendapatkan makanan. Data FIES divalidasi menggunakan Teori *Respons Item* (model Rasch) untuk mengonfirmasi bahwa data FIES memberikan ukuran kerawanan pangan yang andal. Sebagai catatan, untuk penghitungan IKPS level provinsi dan kabupaten/kota, indikator ini tidak diikutsertakan.

Kerawanan pangan dipengaruhi oleh berbagai aspek, yaitu sebagai berikut:

- Kemiskinan, dimana masyarakat di daerah miskin mempunyai kecenderungan untuk mengalami kerawanan pangan (kelaparan). Mayoritas penduduk miskin tinggal di daerah perdesaan dengan kondisi lahan marginal dan fasilitas infrastruktur yang tidak memadai. Kualitas sumber daya manusia di daerah tersebut relatif rendah dan banyak yang mengalami keterbatasan modal.
- Pendapatan rumah tangga, dimana besarnya pendapatan menentukan daya beli rumah tangga tersebut akan bahan pangan. Umumnya rumah tangga dengan penghasilan rendah mempergunakan sebagian besar pendapatannya untuk membeli makanan.
- Jumlah anggota rumah tangga, dimana semakin banyak jumlah anggota rumah tangga maka semakin besar pula kemungkinan rumah tangga tersebut mengalami kerawanan pangan.
- Harga barang, dimana fluktuasi harga pangan utama yang umum dikonsumsi rumah tangga akan mempengaruhi kerawanan pangan di rumah tangga tersebut.
- Situasi alam, misalnya saja daerah yang relatif kering memiliki kecenderungan untuk mengalami kerawanan pangan.

9. Ketidacukupan konsumsi pangan

Indikator yang digunakan adalah prevalensi populasi yang tidak mengalami kecukupan konsumsi pangan (*Prevalence of Undernourishment (PoU)*). PoU merupakan salah satu indikator SDGs, yaitu Indikator 2.1.1. Yang dimaksud dengan proporsi penduduk yang tidak mengalami kecukupan konsumsi pangan adalah persentase penduduk dengan konsumsi makanan yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan minimum energi untuk hidup sehat dan aktif sesuai umur, jenis kelamin, dan kondisi fisiknya.

Sebagai catatan, penghitungan IKPS level kabupaten/kota tidak menyertakan indikator ini. Dengan demikian, penghitungan IKPS level kabupaten/kota hanya terdiri dari 5 (lima) dimensi (tanpa dimensi pangan) dan 10 (sepuluh) indikator (tanpa indikator mengalami kerawanan pangan dan ketidacukupan konsumsi pangan).

Ketidacukupan konsumsi pangan dipengaruhi oleh berbagai aspek, yaitu sebagai berikut:

- Kemiskinan, dimana kemiskinan akan melemahkan daya beli masyarakat, termasuk untuk makanan. Hal ini menyebabkan berkurangnya asupan makanan dan lebih lanjut akan berakibat pada berkurangnya nutrisi.
- Daya beli rumah tangga, dimana keadaan ekonomi memegang peranan penting dalam mempengaruhi pola konsumsi. Rumah tangga miskin menggunakan sebagian besar pendapatan mereka untuk memenuhi kebutuhan makanan. Hal ini tentu dapat mempengaruhi pola konsumsi dari rumah tangga tersebut.
- Pengetahuan gizi, dimana apabila tingkat pengetahuan gizi dalam rumah tangga cukup baik, maka semakin baik pula pemilihan keragaman makanan di rumah tangga tersebut.
- Ketersediaan pangan, yaitu kondisi tersedianya pangan yang mencakup makanan dan minuman yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, ternak, ikan serta turunannya bagi penduduk di suatu wilayah tertentu. Kurangnya pangan yang tersedia untuk dimakan dapat menyebabkan timbulnya kelaparan dan kurang gizi.
- Kebiasaan makan dan nilai budaya. Faktor sosial budaya masyarakat yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, agama, adat, dan istiadat di suatu wilayah berpengaruh terhadap sikap pemilihan bahan makanan yang akan dikonsumsi.

- Ketelatenan orang tua, dimana sebagian orang tua balita beranggapan bahwa konsumsi susu dapat menyempurnakan gizi balita dan dapat menutupi kekurangan gizi yang berasal dari sayur-sayuran yang jarang disukai balita.
- Perilaku makan anak. Gizi kurang dan tingkat konsumsi energi yang defisit pada balita dapat disebabkan konsumsi beras sebagai sumber energi utama yang belum mencapai angka kecukupan energi. Kebiasaan balita yang tidak makan malam dan hanya mengonsumsi biskuit, roti, atau jajanan lainnya mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan antara asupan energi dengan energi yang dikeluarkan.
- Prioritas pengeluaran di rumah tangga, misalnya saja masih ditemui rumah tangga yang lebih memilih untuk membeli rokok dibandingkan makanan bergizi. Di sisi lain, maraknya penggunaan telepon genggam dan internet turut mengubah tren pengeluaran di rumah tangga. Di masyarakat, ditemui adanya rumah tangga dengan ekonomi kurang yang relatif lebih memilih untuk membeli paket data daripada membeli makanan bergizi.
- Faktor sosial budaya, misalnya kebiasaan di masyarakat yang memprioritaskan makanan bergizi untuk ayah yang bekerja mencari nafkah, kedua untuk anak laki-laki, dan ketiga untuk perempuan, termasuk ibu.

e. Dimensi pendidikan

Dimensi pendidikan terdiri atas 1 (satu) indikator, yaitu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

10. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Indikator Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang digunakan adalah Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD 3-6 tahun. APK PAUD adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di PAUD (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk berumur 3-6 tahun.

Partisipasi anak pada PAUD dipengaruhi oleh berbagai aspek, yaitu sebagai berikut:

- Adanya Asisten Rumah Tangga (ART) yang memungkinkan ibu meninggalkan rumah untuk mengantarkan anak mengikuti PAUD.
- Pengetahuan, dimana rendahnya pengetahuan orang tua mengenai manfaat PAUD bagi pertumbuhan dan perkembangan anak mengakibatkan orang tua tersebut tidak mengikutkan anaknya dalam kelas PAUD.
- Pendapatan rumah tangga, dimana rendahnya pendapatan rumah tangga mengakibatkan prioritas keluarga adalah untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari.

- Pemahaman yang salah di masyarakat yang menganggap bahwa sekolah dimulai dari Sekolah Dasar.
- Terbatasnya jumlah PAUD, dimana tidak semua daerah memiliki PAUD.
- Akses terhadap PAUD, dimana PAUD relatif banyak tersedia di daerah perkotaan. Dan sebaliknya, PAUD relatif kurang tersedia di daerah perdesaan. Hal ini menyebabkan masyarakat di daerah perdesaan kurang memiliki akses terhadap PAUD.

f. Dimensi perlindungan sosial

Dimensi perlindungan sosial terdiri atas 2 (dua) indikator, yaitu kepemilikan JKN/jamkesda dan penerima KPS/KKS atau bantuan pangan.

11. Kepemilikan JKN/jamkesda

Indikator JKN/jamkesda yang digunakan adalah persentase penduduk yang memiliki JKN (BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) atau BPJS kesehatan non-PBI/mandiri) atau jamkesda. Kepemilikan JKN/Jamkesda dipengaruhi oleh berbagai aspek, yaitu sebagai berikut:

- Status pekerjaan, misalnya seseorang yang bekerja di perusahaan/lembaga tertentu akan didaftarkan dan dibayarkan biaya kepesertaannya oleh perusahaan/lembaga tempat bekerjanya tersebut.
- Kepesertaan dalam BPJS Kesehatan PBI, dimana fakir miskin dan keluarga tidak mampu yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), kepesertaan dan iuran bulanan dari BPJS Kesehatan-nya dibayarkan oleh pemerintah.
- Pengetahuan masyarakat, dimana rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai manfaat JKN menyebabkan turunnya keinginan untuk memiliki JKN. Dari kasus ini terlihat bahwa sosialisasi mengenai JKN perlu menjadi perhatian semua pelaku program secara terus menerus. Sosialisasi perlu dilakukan melalui media-media yang memudahkan masyarakat untuk mengetahui informasi tersebut.
- Pendapatan rumah tangga, dimana pendapatan yang rendah mampu menurunkan minat masyarakat untuk memiliki JKN. Hal ini disebabkan masih banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi oleh rumah tangga sehingga tidak ada alokasi pendapatan untuk membayar iuran JKN.
- Keluhan kesehatan yang dimiliki. Hal ini dikarenakan keluhan kesehatan berhubungan dengan kepemilikan asuransi kesehatan. Ditemukan adanya gejala peningkatan kepemilikan asuransi pada penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan dan yang merasa terganggu dengan keluhan kesehatan yang dialaminya tersebut.

12. Penerima KPS/KKS atau bantuan pangan

Indikator penerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau bantuan pangan yang digunakan adalah persentase rumah tangga yang menerima KPS/KKS atau bantuan pangan (penduduk 40 persen terbawah). Rumah tangga dikatakan menerima KPS/KKS jika salah satu anggota rumah tangga memiliki KKS *Combo* yang dapat digunakan sebagai media penyaluran bantuan sosial dan subsidi, baik yang dapat menunjukkan kartu KPS/KKS maupun tidak. Adapun rumah tangga dikatakan menerima bantuan pangan apabila rumah tangga membeli/menerima Beras Miskin (Raskin)/Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Bansos Rastra)/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Program Sembako dalam 4 (empat) bulan terakhir.

Kriteria masyarakat penerima KKS adalah sebagai berikut:

- Penyandang disabilitas dan lanjut usia yang tinggal di panti atau Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS).
- Gelandangan dan pengemis yang tinggal di panti, di bawah kolong jembatan, serta tidak memiliki tempat tinggal tetap atau tidak layak huni.
- Korban penyalahgunaan napza yang tinggal di panti atau LKS
- Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP).

Adapun syarat yang harus dipenuhi sebagai penerima KKS adalah sebagai berikut:

- Memiliki dokumen kewarganegaraan.
- Memiliki surat keterangan dari RT/RW, Lurah, Dinas Sosial yang menerangkan bahwa gelandangan dan pengemis bersangkutan, berada di wilayah domisili dinas sosial tersebut.
- Terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
- Lolos verifikasi dan pencocokan data serta ditetapkan dalam daftar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) penerima KKS melalui Surat Keputusan Menteri Sosial.

2.3 Sumber Data

IKPS dihitung menggunakan indikator yang dihasilkan dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Susenas adalah survei berbasis rumah tangga yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik untuk menyediakan data empiris yang dapat mencerminkan keadaan sosial ekonomi masyarakat. Susenas mengumpulkan berbagai informasi seperti keterangan kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, akses terhadap makanan, perumahan, pengeluaran rumah tangga, dan lain sebagainya. Data-data yang dihasilkan dari Susenas banyak dimanfaatkan untuk perencanaan dan evaluasi program pembangunan nasional,

perencanaan dan evaluasi program sektoral Kementerian/Lembaga, penyediaan indikator SDGs dan RPJMN, serta penyediaan data bagi UN *Agency*, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), perusahaan, akademisi, dan pengguna data lainnya.

Susenas dilaksanakan 2 (dua) kali dalam setahun yaitu pada bulan Maret dan bulan September. Data Susenas yang digunakan dalam penyusunan IKPS adalah data Susenas Maret tahun yang bersesuaian. Sebagai dampak dari adanya perubahan indikator penyusun IKPS, maka diperlukan adanya penghitungan ulang IKPS sejak tahun 2018. Khusus untuk IKPS tahun 2018, beberapa indikator yaitu imunisasi, ASI eksklusif, dan MP ASI dihasilkan dengan menggunakan data integrasi Susenas Maret 2018 dan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018. Seperti yang diketahui, pada tahun 2018, Susenas Maret 2018 diintegrasikan dengan Riskesdas 2018 yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Hal ini dilakukan agar data *stunting* yang dihasilkan melalui Riskesdas 2018 dapat didisagregasikan menurut kondisi sosial ekonomi.

Jumlah rumah tangga sampel Susenas Maret 2021 adalah 345.000 rumah tangga sampel. Jumlah ini sama dengan jumlah rumah tangga sampel Susenas Maret 2020, dan lebih besar dibandingkan jumlah rumah tangga sampel pada Susenas Maret 2018 dan 2019 yang masing-masing sebanyak 300.000 dan 320.000 rumah tangga sampel. Dengan adanya kenaikan jumlah rumah tangga sampel, diharapkan agar estimasi yang dihasilkan dapat lebih menggambarkan kondisi sebenarnya di lapangan.

2.4 Normalisasi Indikator

Normalisasi indikator adalah proses penyekalaan nilai indikator sehingga semua indikator memiliki rentang dan arah yang sama. Terdapat 2 (dua) hal yang dilakukan dalam normalisasi indikator untuk penghitungan IKPS yaitu:

1. Menentukan nilai minimal dan maksimal sehingga semua indikator memiliki rentang yang sama,
2. Merubah arah indikator sehingga semua indikator memiliki arah yang sama.

Penentuan nilai minimal dan nilai maksimal dilakukan untuk menghitung skor setiap indikator penyusun IKPS. Nilai minimal dan maksimal untuk masing-masing indikator diperoleh dari target RPJMN 2020-2024, Rancangan Perpres tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*), dan masukan/kesepakatan para pakar. Daftar lengkap nilai minimal dan nilai maksimal untuk masing-masing indikator penyusun IKPS serta dasar penentuan nilai-nilai tersebut disajikan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2
Nilai Minimal dan Maksimal Indikator Penyusun IKPS

Dimensi/Indikator	Nilai Minimal	Nilai Maksimal	Dasar Penentuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Dimensi kesehatan			
Imunisasi	0	90	RPJMN 2020-2024
Penolong persalinan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan	0	100	Kesepakatan pakar
KB modern	0	80	Kesepakatan pakar
Dimensi gizi			
ASI eksklusif	0	80	Rancangan Perpres dan kesepakatan pakar
MP ASI	0	80	Kesepakatan pakar
Dimensi perumahan			
Air minum layak	0	100	Rancangan Perpres dan kesepakatan pakar
Sanitasi layak	0	100	Kesepakatan pakar
Dimensi pangan			
Mengalami kerawanan pangan	0	60	Kesepakatan pakar
Ketidakcukupan konsumsi pangan	0	60	Kesepakatan pakar
Dimensi pendidikan			
PAUD	0	90	Kesepakatan pakar
Dimensi perlindungan sosial			
Kepemilikan JKN/jamkesda	0	100	Kesepakatan pakar
Penerima KPS/KKS atau bantuan pangan	0	80	Kesepakatan pakar

Dari 12 indikator penyusun IKPS, 10 (sepuluh) indikator memiliki arah positif sedangkan 2 (dua) indikator lainnya yaitu mengalami kerawanan pangan dan ketidakcukupan konsumsi pangan memiliki arah negatif. Agar seluruh indikator memiliki arah yang sama, dilakukan proses normalisasi dengan menggunakan persamaan berikut:

1. Untuk indikator yang bersifat positif:

$$SX_i = \frac{X_i - X_{min}}{X_{max} - X_{min}} \times 100$$

2. Untuk indikator yang bersifat negatif:

$$SX_i = 100 - \left(\frac{X_i - X_{min}}{X_{max} - X_{min}} \times 100 \right)$$

Keterangan:

SX_i : nilai indikator yang sudah dinormalisasi

X_i : nilai indikator (empiris)

X_{min} : nilai minimal indikator yang ditetapkan

X_{max} : nilai maksimal indikator yang ditetapkan

2.5 Penimbang Dimensi

Dalam menghitung suatu indeks, masing-masing dimensi penyusun indeks dapat memiliki penimbang yang sama (*equal weighting*) ataupun berbeda. Penimbang yang sama menunjukkan bahwa setiap dimensi memiliki tingkat kepentingan yang sama dalam membentuk suatu indeks. Sebaliknya, penimbang yang berbeda pada setiap dimensi menunjukkan bahwa suatu dimensi lebih penting dibandingkan dengan dimensi lainnya.

Tabel 2.3
Penimbang Dimensi Penyusun IKPS

No.	Dimensi	Penimbang
(1)	(2)	(3)
1	Kesehatan	1/6
2	Gizi	1/6
3	Perumahan	1/6
4	Pangan	1/6
5	Pendidikan	1/6
6	Perlindungan sosial	1/6

Sesuai dengan hasil rapat tanggal 13 Agustus 2020 yang dihadiri perwakilan dari Setwapres RI, Tim Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (TP2AK), Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), BPS, dan Bank Dunia, penimbang untuk tiap dimensi penyusun IKPS menggunakan *equal weighting*. Kesepakatan ini kemudian juga diperkuat kembali melalui hasil rapat tanggal 3 Juni 2022 yang dihadiri perwakilan dari BPS, Setwapres RI, Kementerian/Lembaga, Bank Dunia, dan para pakar. Dengan demikian, karena IKPS terdiri atas 6 (enam) dimensi maka masing-masing dimensi penyusun IKPS memiliki penimbang sebesar 1/6.

2.6 Relative Standard Error

Dalam suatu survei terdapat kesalahan (*error*) yang disebabkan *sampling error* dan *non sampling error*. *Sampling error* merupakan kesalahan akibat teknik pengambilan sampel dalam suatu survei. Adapun *non sampling error* merupakan kesalahan selain teknik pengambilan sampel dalam suatu survei, seperti kesalahan dalam proses wawancara, kesalahan pada tahapan pengolahan data, dan sebagainya.

Salah satu alat yang dapat digunakan untuk mengukur *sampling error* adalah *Relative Standar Error* (RSE) dari suatu estimasi. RSE dapat digunakan untuk mengukur tingkat presisi dari suatu nilai estimasi. RSE merupakan rasio dari nilai *standard error* dengan nilai estimasi dari suatu variabel/indikator yang dinyatakan dalam persentase. Jika RSE indikator penyusun IKPS 25 persen hingga 50 persen, pengguna data harus berhati-hati dalam menggunakan indikator tersebut. Adapun jika RSE indikator penyusun IKPS lebih dari 50 persen, maka nilai indikator dianggap tidak akurat (Australian Bureau of Statistics, 2017).

2.7 Confidence Interval

Pada penghitungan IKPS level kabupaten/kota, dilakukan penghitungan *confidence interval* baik untuk indikator, dimensi, maupun IKPS masing-masing kabupaten/kota tersebut. Dengan menggunakan *bootstrapping*, dilakukan *resampling* dari sampel Susenas untuk menghasilkan estimasi interval yang telah mempertimbangkan aspek *uncertainty* dari setiap komponen.

Langkah-langkah melakukan *bootstrapping* untuk memperoleh estimasi interval adalah sebagai berikut:

1. Menghitung proporsi indikator penyusun IKPS beserta *standard error* dan RSE dari indikator tersebut.
2. Melakukan normalisasi dari proporsi indikator penyusun IKPS.
3. Melakukan konversi hasil normalisasi proporsi ke dalam bentuk logit dan menghitung *standard error* dari nilai logit tersebut.
4. Membangkitkan angka random untuk nilai logit, dengan asumsi mengikuti distribusi normal.
5. Melakukan konversi ulang nilai logit ke nilai proporsi indikator penyusun IKPS, sekaligus menghitung indeks dimensi dan IKPS. Dengan demikian akan diperoleh *confidence interval* untuk IKPS maupun masing-masing dimensi penyusunnya.

2.8 Diagram Sankey

Diagram Sankey merupakan diagram yang digunakan untuk menunjukkan adanya aliran atau perubahan. Blinder et al. (2019) menyebutkan bahwa diagram Sankey merupakan pilihan yang tepat untuk alat visualisasi data. Diagram Sankey dapat dimanfaatkan untuk melihat pola transisi capaian IKPS antarwaktu. Untuk melihat ada tidaknya transisi capaian IKPS antarwaktu, IKPS dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) kategori yaitu rendah, sedang, dan tinggi, dimana masing-masing kategori memiliki interval yang sama. Interval dihitung dengan rumusan sebagai berikut:

$$i = \frac{X_{max} - X_{min}}{n}$$

Keterangan:

i : interval

X_{max} : nilai maksimal

X_{min} : nilai minimal

n : jumlah kelompok

<https://www.bps.go.id>

INDEKS KHUSUS PENANGANAN *STUNTING*

3.1 IKPS Nasional

Dalam rangka percepatan penurunan *stunting* secara merata di wilayah Indonesia, pemerintah melalui Kementerian/Lembaga dan didukung oleh pemerintah daerah telah menyelenggarakan berbagai intervensi. Seiring dengan hal itu, dibutuhkan suatu mekanisme *monitoring* dan evaluasi berbagai program yang telah dilakukan, salah satunya melalui IKPS. Berkenaan dengan adanya penggantian indikator penyusun IKPS pada dimensi perlindungan sosial, maka dilakukan penghitungan ulang IKPS sejak tahun 2018.

IKPS tahun 2018 hingga tahun 2021 menunjukkan kecenderungan untuk meningkat (Gambar 3.1). Dalam 4 (empat) tahun terakhir, terjadi kenaikan IKPS sebesar 1,5 persen poin. Dengan kata lain, secara rata-rata terjadi peningkatan IKPS sekitar 0,4 persen poin setiap tahunnya. Kenaikan IKPS tentunya disebabkan adanya perubahan indeks baik pada level indikator maupun level dimensi.

Pada 2 (dua) tahun terakhir, mayoritas indeks dimensi penyusun IKPS menunjukkan peningkatan. Pada periode ini, penurunan indeks hanya terjadi pada dimensi pendidikan, yaitu dari 41,7 pada tahun 2020 menjadi 39,5 pada tahun 2021 (Gambar 3.1). Peningkatan tertinggi terjadi pada dimensi kesehatan dan dimensi perlindungan sosial, yaitu dengan peningkatan indeks sebesar 1,5 poin. Adapun untuk 3 (tiga) dimensi lainnya, yaitu dimensi gizi, perumahan, dan dimensi pangan, mengalami peningkatan capaian indeks dimensi pada periode tersebut masing-masing sebesar 1,3; 0,6; dan 0,1 poin.

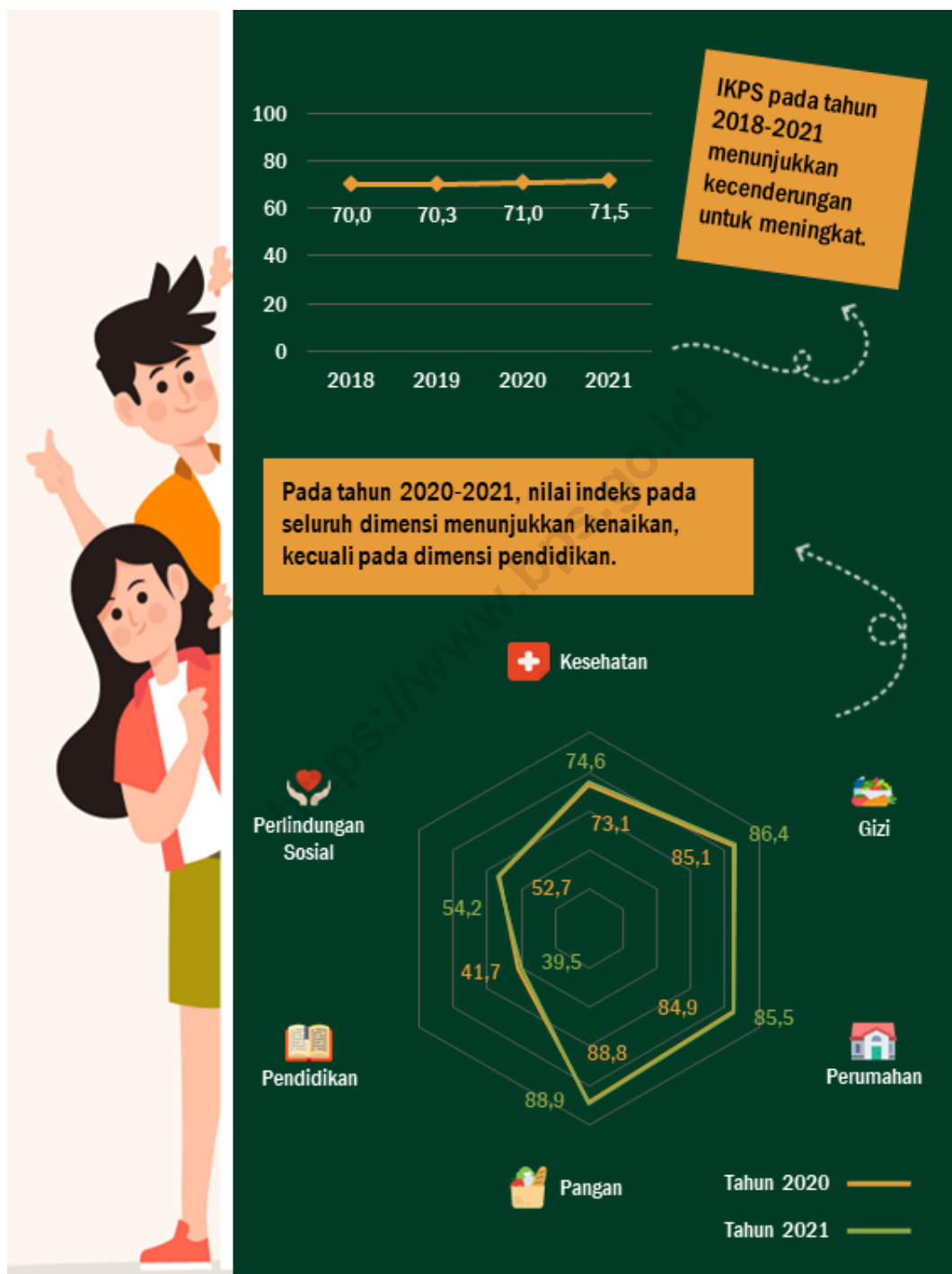
Jika dibandingkan dengan dimensi penyusun IKPS yang lain, dimensi pendidikan dan dimensi perlindungan sosial merupakan 2 (dua) dimensi yang masih perlu ditingkatkan lagi capaiannya. Peningkatan capaian pada dimensi tersebut diharapkan dapat turut meningkatkan capaian IKPS pada tahun-tahun berikutnya, yang secara tidak langsung menggambarkan peningkatan upaya percepatan penurunan *stunting* di Indonesia.

.....

*Dimensi pendidikan dan dimensi perlindungan sosial merupakan dua dimensi yang perlu mendapat perhatian lebih dalam upaya percepatan penurunan *stunting* di Indonesia.*

.....

Gambar 3.1
IKPS Nasional Menurut Dimensi, 2018-2021



Tabel 3.1
Indeks Dimensi dan Indikator Penyusun IKPS, 2020-2021

Dimensi/Indikator	Indeks		
	2020	2021	Selisih
(1)	(2)	(3)	(4)
Dimensi kesehatan	73,1	74,6	1,5
Imunisasi	63,5	67,9	4,4
Penolong persalinan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan KB modern	87,8	88,8	1,0
	67,9	67,2	-0,7
Dimensi gizi	85,1	86,4	1,3
ASI eksklusif	87,0	89,5	2,5
MP ASI	83,3	83,3	0,0
Dimensi perumahan	84,9	85,5	0,6
Air minum layak	90,2	90,8	0,6
Sanitasi layak	79,5	80,3	0,8
Dimensi pangan	88,8	88,9	0,1
Mengalami kerawanan pangan	91,5	92,0	0,5
Ketidacukupan konsumsi pangan	86,1	85,9	-0,2
Dimensi pendidikan	41,7	39,5	-2,2
PAUD	41,7	39,5	-2,2
Dimensi perlindungan sosial	52,7	54,2	1,5
Kepemilikan JKN/jamkesda	66,4	65,7	-0,7
Penerima KPS/KKS atau bantuan pangan	39,0	42,6	3,6
IKPS	71,0	71,5	0,5

Setelah melakukan pembahasan mengenai capaian indeks masing-masing dimensi penyusun IKPS, selanjutnya akan dilihat capaian indeks untuk indikator-indikator penyusun pada masing-masing dimensi sebagaimana disajikan pada Tabel 3.1. Pada tahun 2021, indikator dengan nilai indeks tertinggi adalah mengalami kerawanan pangan (92,0 poin), diikuti air minum layak (90,8 poin), dan ASI eksklusif (89,5 poin). Adapun indikator dengan nilai indeks terendah adalah kepemilikan JKN/jamkesda (65,7 poin), penerima KPS/KKS atau bantuan pangan (42,6 poin), dan PAUD (39,5 poin).

Jika dilihat dari perubahan indeks masing-masing indikator penyusun IKPS, terlihat bahwa sebagian besar indikator mengalami peningkatan dari tahun 2020-2021. Peningkatan tertinggi terjadi pada indikator imunisasi (4,4 poin), diikuti indikator penerima KPS/KKS atau bantuan pangan (3,6 poin), ASI eksklusif (2,5 poin), dan indikator penolong persalinan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan (1,0 poin). Adapun untuk indikator sanitasi layak, air minum layak, dan mengalami kerawanan pangan, masing-masing kenaikannya sebesar 0,8 poin, 0,6 poin, dan 0,5 poin. Untuk indikator MP ASI, capaian indeks pada tahun 2020 dan 2021 tidak mengalami perubahan, yaitu sebesar 83,3 poin. Pada tahun 2020-2021, terdapat

4 (empat) indikator yang capaian indeksnya menunjukkan penurunan, yaitu indikator PAUD (-2,2 poin), KB modern (-0,7 poin), kepemilikan JKN/jamkesda (-0,7 poin), dan indikator ketidakcukupan konsumsi pangan (-0,2 poin).

Dari penjelasan capaian indikator, dimensi, dan IKPS secara keseluruhan, terlihat bahwa masih ada beberapa indikator dan dimensi penyusun IKPS yang masih harus ditingkatkan lagi capaiannya. Hal ini semata-mata bukan hanya untuk meningkatkan capaian indikator, dimensi, dan IKPS secara nominal, namun lebih untuk mempercepat upaya penurunan *stunting* di Indonesia. Capaian indikator dan dimensi yang masih rendah menggambarkan masih diperlukannya upaya yang lebih giat dalam menjalankan berbagai intervensi terkait indikator dan dimensi penyusun IKPS tersebut. Adapun untuk indikator dan dimensi yang capaiannya sudah baik, berbagai pihak yang terlibat tetap harus meningkatkan upaya dan menjaga agar indikator dan dimensi sesuai dengan target capaian optimal.

.....

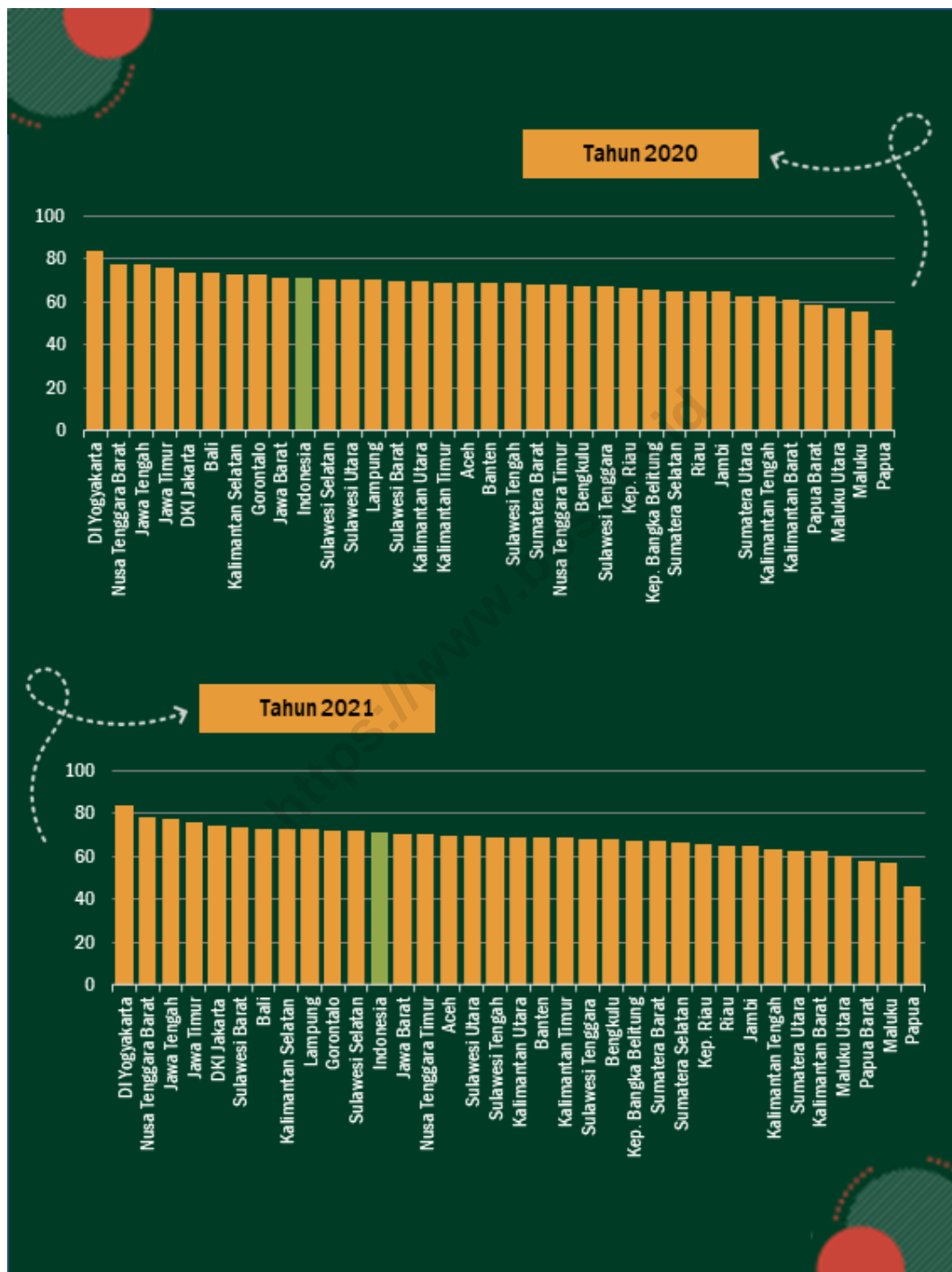
Capaian indikator dan dimensi yang masih rendah menggambarkan masih diperlukannya upaya yang lebih giat dalam menjalankan berbagai intervensi terkait indikator dan dimensi penyusun IKPS tersebut. Adapun untuk yang capaiannya sudah baik, berbagai pihak yang terlibat tetap harus meningkatkan upaya dan menjaga agar indikator dan dimensi sesuai dengan target capaian optimal.

.....

3.2 IKPS Provinsi

Sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, percepatan penurunan *stunting* dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan. Dari poin ini terlihat peranan penting dari pemerintah daerah provinsi dalam upaya penanganan *stunting* di Indonesia. Dalam Peraturan Presiden tersebut juga disebutkan bahwa dalam rangka menyelenggarakan percepatan penurunan *stunting* di tingkat provinsi, gubernur menetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi yang bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* secara efektif, konvergen, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor tingkat provinsi.

Gambar 3.2
IKPS Menurut Provinsi, 2020-2021

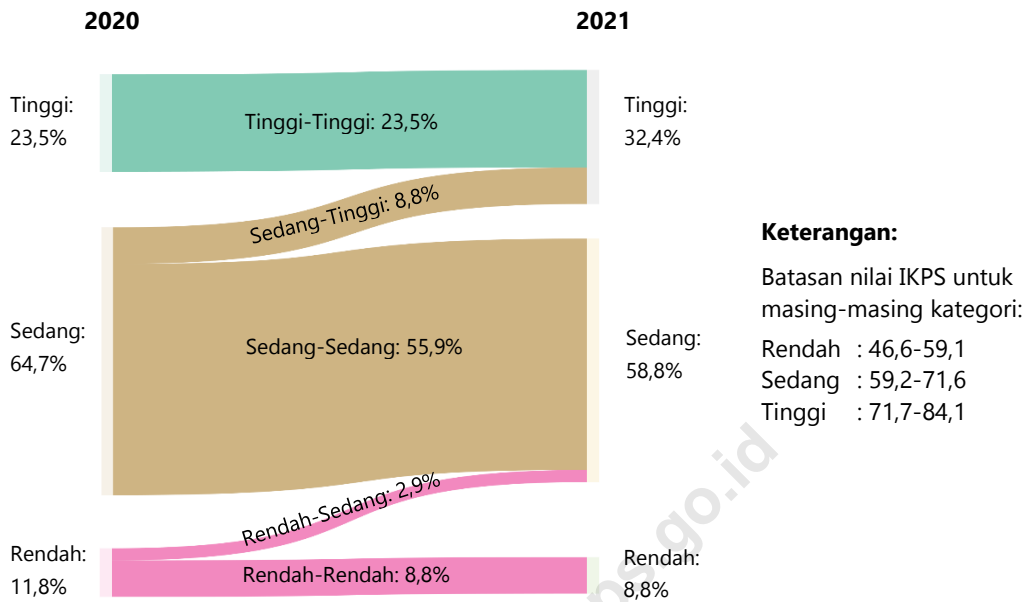


Gambar 3.2 secara tidak langsung mengindikasikan masih perlunya peningkatan kinerja dari berbagai pihak, tidak hanya pemerintah daerah provinsi dalam percepatan penurunan stunting di wilayah masing-masing. Pada tahun 2020-2021, mayoritas provinsi masih memiliki capaian IKPS di bawah angka nasional. Jika dilihat persebarannya, sebagian besar provinsi dengan capaian IKPS di atas angka nasional terletak di wilayah Indonesia Bagian Barat, sedangkan lainnya terletak di Indonesia Bagian Tengah. Adapun untuk provinsi di Indonesia Bagian Timur, yaitu Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua (tidak berurutan) masih menempati posisi terendah dalam hal capaian IKPS. Hal ini menggambarkan masih adanya kesenjangan penanganan *stunting* di level provinsi antarwilayah di Indonesia. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama dari berbagai pihak agar percepatan penurunan *stunting* dapat dilakukan secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Setelah melihat persebaran capaian IKPS masing-masing provinsi, selanjutnya akan dikaji transisi capaian IKPS provinsi-provinsi tersebut pada tahun 2020-2021 dengan menggunakan Diagram Sankey. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pada Diagram Sankey capaian IKPS dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kategori yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Pengelompokkan dilakukan berdasarkan capaian IKPS tahun 2020 yang urutkan dari nilai terkecil hingga terbesar, kemudian dibagi menjadi 3 (tiga) kategori dengan interval yang sama.

Pada tahun 2020, IKPS terendah pada level provinsi tercatat sebesar 46,6 poin sedangkan yang tertinggi sebesar 83,9 poin. Dari kedua nilai tersebut diperoleh nilai interval sebesar 12,4 dan batasan untuk setiap kategori. Dari pengelompokkan ini, sebanyak 11,8 persen provinsi masuk ke dalam kategori rendah, 64,7 persen masuk ke dalam kategori sedang, dan 23,5 persen provinsi masuk ke dalam kategori capaian IKPS tinggi. Batasan tersebut kemudian diterapkan pada capaian IKPS tahun 2021 untuk melihat transisi provinsi menurut capaian IKPS tahun 2020-2021. Sebagai catatan, untuk provinsi dengan capaian IKPS tahun 2021 yang lebih rendah dibandingkan IKPS terendah tahun 2020 (sebesar 46,6 poin), maka provinsi tersebut dikelompokkan dalam kategori rendah.

Berdasarkan pengelompokkan dengan menggunakan data tahun 2020 dan 2021, lebih dari separuh provinsi masuk ke dalam kategori sedang. Selanjutnya, transisi capaian IKPS yang dilihat melalui Diagram Sankey menunjukkan pola yang positif. Artinya, beberapa provinsi yang mengalami transisi menunjukkan perbaikan, baik dari kategori rendah menjadi sedang, maupun dari kategori sedang menjadi tinggi. Dari 11,8 persen provinsi yang berada pada kategori rendah pada tahun 2020, 2,9 persen provinsi membaik menjadi kategori sedang. Sementara itu, dari 64,7 persen provinsi yang berkategori sedang pada tahun 2020, 8,8 persen provinsi membaik menjadi kategori tinggi (Gambar 3.3).

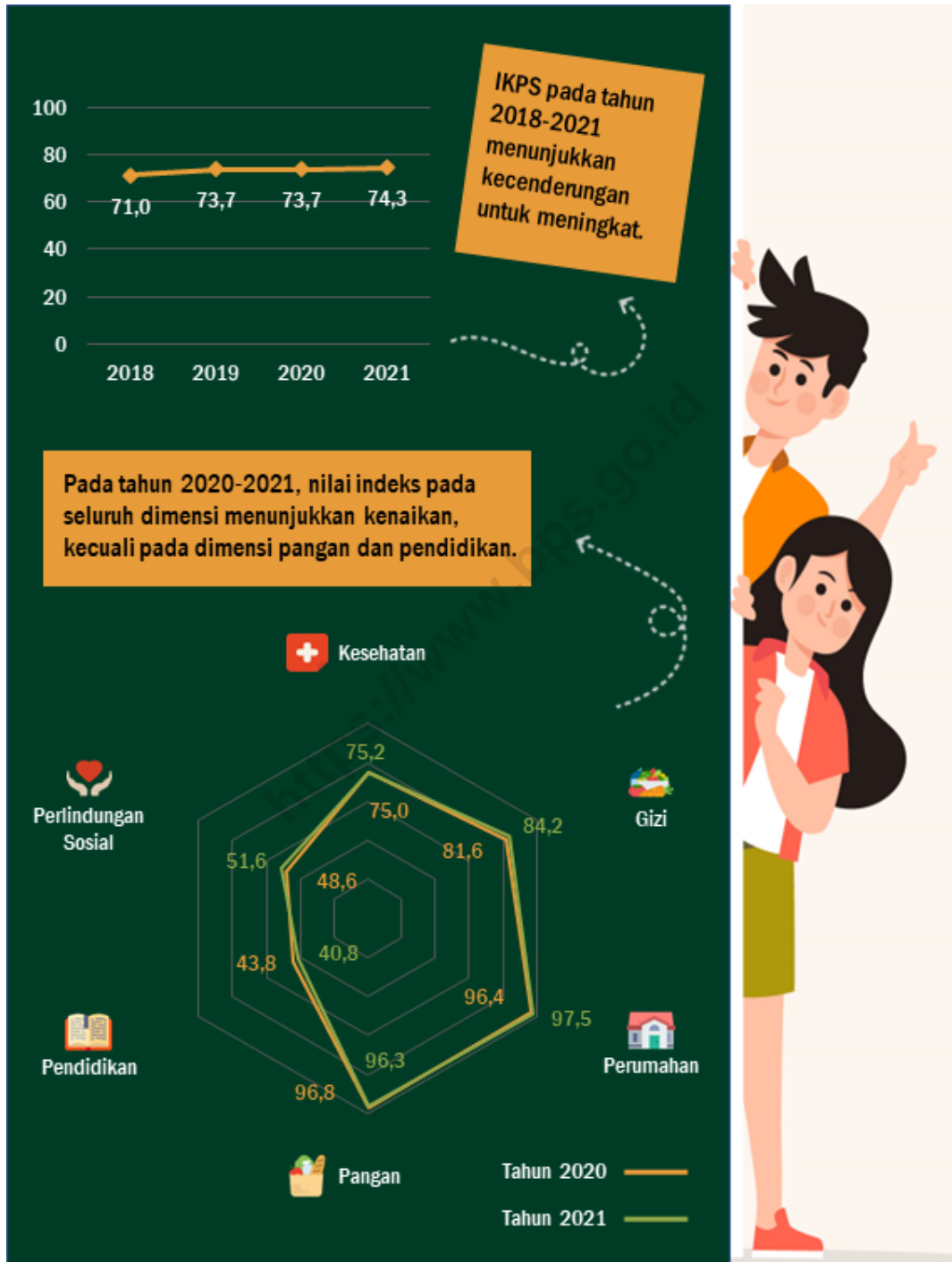
Gambar 3.3
Transisi IKPS Provinsi, 2020-2021



Adanya IKPS pada level provinsi diharapkan dapat diberdayakan seoptimal mungkin oleh pemerintah daerah, tidak terkecuali pemerintah daerah provinsi, dalam merumuskan kebijakan terkait percepatan penurunan *stunting* di wilayahnya masing-masing. Sebagai contoh pemanfaatan IKPS dalam perumusan kebijakan di tingkat provinsi tersebut, berikut akan disajikan interpretasi IKPS Provinsi DKI Jakarta yang merupakan ibu kota negara Republik Indonesia.

Secara umum, IKPS Provinsi DKI Jakarta dalam 4 (empat) tahun terakhir menunjukkan peningkatan. Adapun dari capaian indeks dimensi penyusun IKPS, terlihat bahwa peningkatan capaian IKPS Provinsi DKI Jakarta tahun 2020-2021 didukung oleh peningkatan nilai indeks pada hampir seluruh dimensi penyusunnya (Gambar 3.4). Dimensi perlindungan sosial mengalami peningkatan nilai indeks tertinggi yaitu dari 48,6 poin pada tahun 2020 menjadi 51,6 poin pada tahun 2021. Peningkatan ini sejalan dengan peningkatan capaian indeks indikator penyusun dimensi tersebut. Adapun untuk dimensi kesehatan dan gizi, walaupun indeks dimensi mengalami peningkatan, namun apabila diperhatikan indikator penyusun dimensi tersebut, ada indikator yang nilainya mengalami penurunan (Tabel 3.2). Hal ini juga perlu menjadi perhatian para pihak yang terkait.

Gambar 3.4
IKPS Provinsi DKI Jakarta Menurut Dimensi, 2018-2021



Tabel 3.2
Indeks Dimensi dan Indikator Penyusun IKPS Provinsi DKI Jakarta, 2020-2021

Dimensi/Indikator	Indeks		
	2020	2021	Selisih
(1)	(2)	(3)	(4)
Dimensi kesehatan	75,0	75,2	0,2
Imunisasi	67,1	69,0	1,9
Penolong persalinan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan KB modern	99,2	99,3	0,1
	58,8	57,3	-1,5
Dimensi gizi	81,6	84,2	2,6
ASI eksklusif	88,6	82,0	-6,6
MP ASI	74,7	86,4	11,7
Dimensi perumahan	96,4	97,5	1,1
Air minum layak	99,8	99,9	0,1
Sanitasi layak	93,0	95,2	2,2
Dimensi pangan	96,8	96,3	-0,5
Ketidacukupan konsumsi pangan	96,8	96,3	-0,5
Dimensi pendidikan	43,8	40,8	-3,0
PAUD	43,8	40,8	-3,0
Dimensi perlindungan sosial	48,6	51,6	3,0
Kepemilikan JKN/jamkesda	85,4	85,6	0,2
Penerima KPS/KKS atau bantuan pangan	11,8	17,7	5,9
IKPS	73,7	74,3	0,6

Berbeda dengan dimensi perlindungan sosial, dimensi pendidikan merupakan dimensi dengan penurunan indeks tertinggi. Hal ini dikarenakan adanya penurunan capaian indeks pada satu-satunya indikator pada dimensi tersebut. Dimensi lainnya yang juga mengalami penurunan adalah dimensi pangan, yaitu dari 96,8 poin pada tahun 2020 menjadi 96,3 poin pada tahun 2021. Penurunan ini juga dipacu oleh penurunan capaian indeks dari satu-satunya indikator pada dimensi tersebut, yaitu indikator ketidacukupan konsumsi pangan (Tabel 3.2).

Dari Tabel 3.2 terlihat bahwa beberapa indikator/dimensi pada Provinsi DKI Jakarta telah memiliki capaian yang tinggi. Namun demikian, masih ada juga indikator/dimensi yang capaiannya masih dapat ditingkatkan lagi, misalnya saja indikator PAUD pada dimensi pendidikan, serta indikator penerima KPS/KKS atau bantuan pangan pada dimensi perlindungan sosial. Peningkatan capaian IKPS pada komponen ini diharapkan tidak hanya berpengaruh secara nominal pada peningkatan IKPS Provinsi DKI Jakarta pada tahun-tahun berikutnya, namun lebih pada semakin dekatnya perwujudan cita-cita penanganan *stunting* di Provinsi DKI Jakarta pada khususnya, dan di Indonesia pada umumnya.

3.3 IKPS Kabupaten/Kota

Berbeda dengan IKPS pada tahun-tahun sebelumnya, IKPS level kabupaten/kota pada laporan ini disajikan untuk seluruh kabupaten/kota. Namun hal yang sangat penting untuk diperhatikan adalah indeks indikator untuk level kabupaten/kota disertai catatan pada indikator dengan RSE sebesar 25 persen atau lebih. Jika RSE indikator penyusun IKPS 25 persen hingga 50 persen, pengguna data harus berhati-hati dalam menggunakan indikator tersebut. Adapun jika RSE indikator penyusun IKPS lebih dari 50 persen, maka nilai indikator dianggap tidak akurat.

Pertimbangan mengenai penyajian IKPS berdasarkan RSE tidak hanya digunakan pada level kabupaten/kota, namun juga penghitungan IKPS pada level nasional dan provinsi. Namun demikian, karena jumlah sampel pada level nasional dan provinsi relatif cukup, maka RSE untuk seluruh indikator penyusun IKPS pada level nasional dan provinsi kurang dari 25 persen sehingga dianggap memenuhi syarat dari segi statistik.

Untuk IKPS tahun 2020-2021, terdapat 235 kabupaten/kota dengan RSE kurang dari 25 persen untuk seluruh indikator penyusun IKPS tahun 2020-2021. Secara lengkap, daftar nama kabupaten/kota tersebut disajikan pada Tabel 3.3 adapun capaian IKPS masing-masing kabupaten/kota tersebut terdapat pada Lampiran 3.1.

Tabel 3.3
Jumlah dan Nama Kabupaten/Kota dengan RSE Kurang dari 25 Persen
untuk Seluruh Indikator Penyusun IKPS Tahun 2020-2021

Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota	Nama Kabupaten/Kota
(1)	(2)	(3)
Aceh	1	Kab. Aceh Tamiang
Sumatera Utara	7	Kab. Tapanuli Utara, Kab. Asahan, Kab. Dairi, Kab. Karo, Kab. Humbang Hasundutan, Kab. Batu Bara, Kota Gunungsitoli
Sumatera Barat	5	Kab. Pesisir Selatan, Kab. Solok, Kab. Sijunjung, Kab. Dharmasraya, Kota Solok
Riau	5	Kab. Kuantan Singingi, Kab. Indragiri Hulu, Kab. Indragiri Hilir, Kab. Bengkalis, Kota Dumai
Jambi	3	Kab. Batang Hari, Kab. Tebo, Kab. Bungo
Sumatera Selatan	7	Kab. Ogan Komering Ilir, Kab. Muara Enim, Kab. Ogan Komering Ulu Timur, Kab. Ogan Ilir, Kota Palembang, Kota Pagar Alam, Kota Lubuk Linggau
Bengkulu	8	Kab. Bengkulu Selatan, Kab. Rejang Lebong, Kab. Kaur, Kab. Seluma, Kab. Mukomuko, Kab. Lebong, Kab. Kepahiang, Kab. Bengkulu Tengah
Lampung	14	Kab. Lampung Barat, Kab. Tanggamus, Kab. Lampung Selatan, Kab. Lampung Timur, Kab. Lampung Tengah, Kab. Lampung Utara, Kab. Way Kanan, Kab. Tulangbawang, Kab. Pringsewu, Kab.

Tabel 3.3 (Lanjutan)

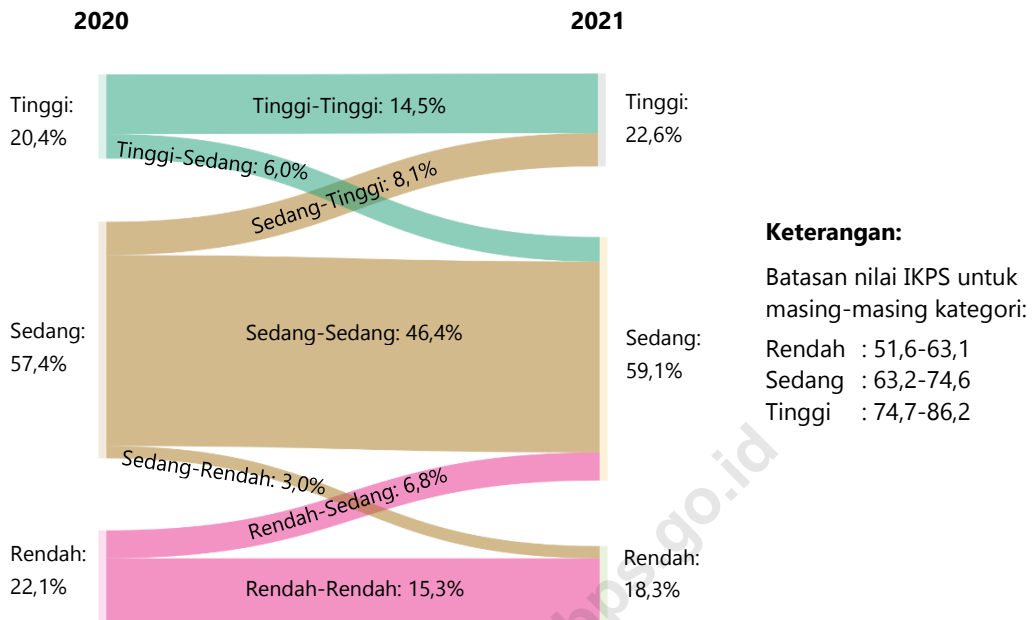
Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota	Nama Kabupaten/Kota
(1)	(2)	(3)
		Mesuji, Kab. Tulang Bawang Barat, Kab. Pesisir Barat, Kota Bandar Lampung, Kota Metro
Kep. Bangka Belitung	1	Kab. Bangka
Kep. Riau	4	Kab. Bintan, Kab. Lingga, Kota Batam, Kota Tanjung Pinang
DKI Jakarta	4	Kab. Kepulauan Seribu, Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Utara
Jawa Barat	23	Kab. Bogor, Kab. Sukabumi, Kab. Cianjur, Kab. Bandung, Kab. Garut, Kab. Tasikmalaya, Kab. Ciamis, Kab. Kuningan, Kab. Cirebon, Kab. Majalengka, Kab. Sumedang, Kab. Purwakarta, Kab. Bekasi, Kab. Bandung Barat, Kab. Pangandaran, Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Cimahi, Kota Tasikmalaya
Jawa Tengah	33	Kab. Cilacap, Kab. Banyumas, Kab. Purbalingga, Kab. Banjarnegara, Kab. Kebumen, Kab. Purworejo, Kab. Wonosobo, Kab. Magelang, Kab. Boyolali, Kab. Klaten, Kab. Sukoharjo, Kab. Wonogiri, Kab. Karanganyar, Kab. Sragen, Kab. Grobogan, Kab. Blora, Kab. Rembang, Kab. Pati, Kab. Jepara, Kab. Demak, Kab. Semarang, Kab. Temanggung, Kab. Kendal, Kab. Batang, Kab. Pekalongan, Kab. Pemalang, Kab. Tegal, Kab. Brebes, Kota Magelang, Kota Salatiga, Kota Semarang, Kota Pekalongan, Kota Tegal
DI Yogyakarta	3	Kab. Kulon Progo, Kab. Gunung Kidul, Kab. Sleman
Jawa Timur	18	Kab. Pacitan, Kab. Trenggalek, Kab. Blitar, Kab. Kediri, Kab. Malang, Kab. Lumajang, Kab. Jember, Kab. Bondowoso, Kab. Sidoarjo, Kab. Nganjuk, Kab. Bojonegoro, Kab. Tuban, Kab. Lamongan, Kab. Gresik, Kota Blitar, Kota Malang, Kota Pasuruan, Kota Surabaya
Banten	5	Kab. Pandeglang, Kab. Tangerang, Kota Tangerang, Kota Cilegon, Kota Serang
Bali	1	Kab. Gianyar
Nusa Tenggara Barat	7	Kab. Lombok Barat, Kab. Lombok Tengah, Kab. Lombok Timur, Kab. Bima, Kab. Sumbawa Barat, Kab. Lombok Utara, Kota Bima
Nusa Tenggara Timur	19	Kab. Sumba Barat, Kab. Sumba Timur, Kab. Kupang, Kab. Timor Tengah Selatan, Kab. Timor Tengah Utara, Kab. Belu, Kab. Lembata, Kab. Flores Timur, Kab. Sikka, Kab. Ngada, Kab. Manggarai, Kab. Rote Ndao, Kab. Manggarai Barat, Kab.

Tabel 3.3 (Lanjutan)

Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota	Nama Kabupaten/Kota
(1)	(2)	(3)
		Sumba Tengah, Kab. Sumba Barat Daya, Kab. Nagekeo, Kab. Manggarai Timur, Kab. Sabu Raijua, Kota Kupang
Kalimantan Barat	4	Kab. Sambas, Kab. Landak, Kab. Sekadau, Kab. Melawi
Kalimantan Tengah	0	
Kalimantan Selatan	3	Kab. Barito Kuala, Kab. Hulu Sungai Tengah, Kab. Tabalong
Kalimantan Timur	6	Kab. Paser, Kab. Kutai Kartanegara, Kab. Penajam Paser Utara, Kota Balikpapan, Kota Samarinda, Kota Bontang
Kalimantan Utara	3	Kab. Malinau, Kab. Nunukan, Kota Tarakan
Sulawesi Utara	4	Kab. Bolaang Mongondow, Kab. Bolaang Mongondow Utara, Kab. Minahasa Tenggara, Kab. Bolaang Mongondow Selatan
Sulawesi Tengah	9	Kab. Banggai Kepulauan, Kab. Banggai, Kab. Morowali, Kab. Poso, Kab. Donggala, Kab. Toli-Toli, Kab. Parigi Moutong, Kab. Sigi, Kab. Morowali Utara
Sulawesi Selatan	17	Kab. Jeneponto, Kab. Takalar, Kab. Gowa, Kab. Sinjai, Kab. Maros, Kab. Barru, Kab. Bone, Kab. Soppeng, Kab. Wajo, Kab. Sidenreng Rappang, Kab. Enrekang, Kab. Luwu, Kab. Tana Toraja, Kab. Luwu Utara, Kab. Luwu Timur, Kab. Toraja Utara, Kota Makassar
Sulawesi Tenggara	8	Kab. Konawe, Kab. Kolaka, Kab. Konawe Selatan, Kab. Bombana, Kab. Kolaka Utara, Kab. Buton Utara, Kab. Konawe Utara, Kab. Baubau
Gorontalo	1	Kab. Boalemo
Sulawesi Barat	4	Kab. Majene, Kab. Polewali Mandar, Kab. Mamasa, Kab. Mamuju
Maluku	5	Kab. Maluku Tengah, Kab. Buru, Kab. Seram Bagian Barat, Kab. Maluku Barat Daya, Kota Tual
Maluku Utara	1	Kota Tidore Kepulauan
Papua	2	Kab. Kaimana, Kab. Teluk Bintuni
Papua Barat	0	
Indonesia	235	

Bagaimana dengan transisi capaian IKPS tahun 2020-2021 untuk 235 kabupaten/kota dengan RSE kurang dari 25 persen untuk seluruh indikator penyusun IKPS tahun 2020-2021? Hal ini terjawab melalui Diagram Sankey sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3.5.

Gambar 3.5
Transisi IKPS Kabupaten/Kota, 2020-2021



Sama halnya dengan IKPS provinsi, capaian IKPS kabupaten/kota dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu kategori rendah, sedang, dan tinggi. Pengkategorian IKPS kabupaten/kota dihitung menggunakan metode yang sama dengan IKPS provinsi. Dengan capaian terendah IKPS 235 kabupaten/kota pada tahun 2020 sebesar 51,6 poin dan tertinggi sebesar 86,0 poin, diperoleh interval sebesar 11,5. Hasil yang diperoleh dari pengkategorian dengan metode tersebut yaitu 22,1 persen kabupaten/kota masuk ke dalam kategori rendah, 57,4 persen masuk ke dalam kategori sedang, dan 20,4 persen kabupaten/kota masuk ke dalam kategori tinggi pada tahun 2020. Sebagai catatan, untuk kabupaten/kota dengan capaian IKPS tahun 2021 yang lebih tinggi dibandingkan IKPS tertinggi tahun 2020 (sebesar 86,0 poin), maka kabupaten/kota tersebut dikelompokkan dalam kategori tinggi.

Selanjutnya, Gambar 3.5 menunjukkan bahwa lebih dari separuh kabupaten/kota masuk ke dalam kategori sedang baik pada tahun 2020 maupun 2021. Terjadi penurunan persentase kabupaten/kota yang masuk ke dalam kategori rendah yang semula 22,1 persen pada tahun 2020 menjadi 18,3 persen pada tahun 2021. Sebaliknya, terjadi peningkatan persentase kabupaten/kota yang masuk ke dalam kategori sedang dan tinggi pada tahun 2021. Dengan demikian, secara umum dapat dikatakan bahwa terjadi peningkatan capaian IKPS pada 235 kabupaten/kota dengan RSE kurang dari 25 persen untuk seluruh indikator penyusun IKPS tahun 2020-2021.

Berikutnya akan disajikan interpretasi IKPS salah satu kabupaten/kota yang masuk dalam kabupaten/kota dengan RSE kurang dari 25 persen untuk seluruh indikator penyusun IKPS

tahun 2020-2021, yaitu Kota Balikpapan. Diharapkan agar contoh interpretasi ini dapat dijadikan panduan dalam memahami dan mengartikan capaian IKPS, untuk selanjutnya dijadikan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan terkait percepatan penurunan stunting di wilayah masing-masing.

Secara umum, terjadi penurunan capaian IKPS tahun 2020-2021 untuk Kota Balikpapan (Gambar 3.6). Namun demikian, jika dilihat batas atas dan batas bawah dari IKPS sebagaimana disajikan pada Lampiran 3.2, ternyata interval IKPS tahun 2020-2021 Kota Balikpapan beririsan. Dengan demikian, walaupun secara estimasi titik terjadi penurunan IKPS tahun 2020-2021, namun dari segi estimasi interval, IKPS pada periode tersebut bisa saja tidak berubah.

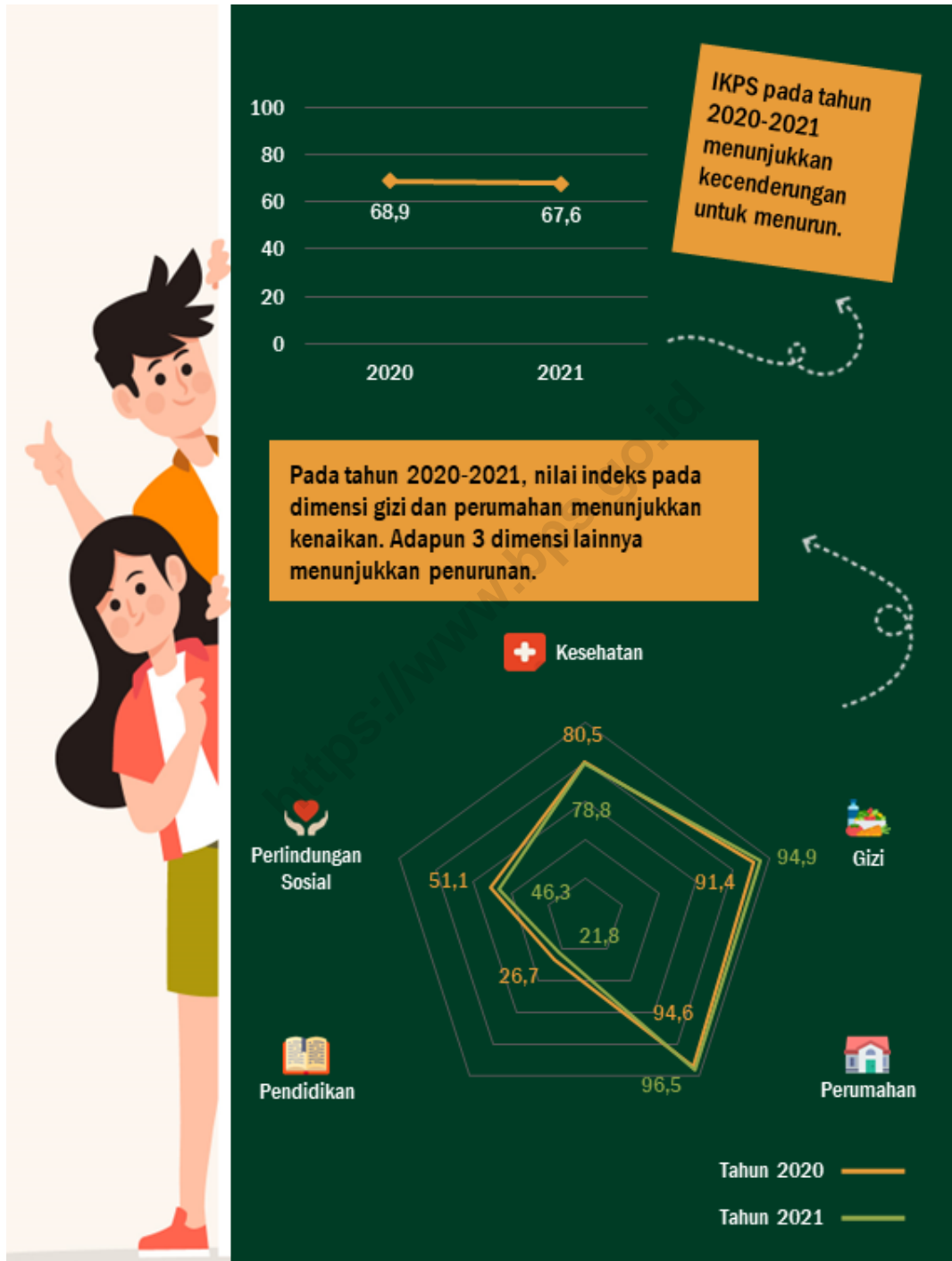
Dari 5 (lima) dimensi penyusun IKPS pada level kabupaten/kota, 3 (tiga) indeks dimensi penyusun IKPS Kota Balikpapan tahun 2020-2021 menunjukkan penurunan. Ketiga dimensi tersebut yaitu dimensi kesehatan, pendidikan, dan dimensi perlindungan sosial. Penurunan tersebut diakibatkan penurunan nilai indeks pada mayoritas/seluruh indikator penyusunnya (Tabel 3.4). Adapun untuk 2 (dua) dimensi lainnya, yaitu dimensi gizi dan perumahan menunjukkan adanya kenaikan capaian indeks. Kenaikan ini didukung kenaikan indeks indikator penyusun kedua dimensi tersebut. Namun demikian, apabila dilihat estimasi interval dari seluruh dimensi penyusun IKPS, ternyata interval indeks tahun 2020-2021 Kota Balikpapan beririsan. Dengan demikian, dimungkinkan tidak terjadi perubahan capaian indeks pada dimensi-dimensi tersebut.

Dilihat dari capaian indeks dimensi secara keseluruhan, terlihat bahwa dimensi pendidikan dan dimensi perlindungan sosial merupakan 2 (dua) dimensi yang perlu mendapat perhatian lebih dalam upaya percepatan penurunan stunting di Kota Balikpapan. Capaian kedua indeks ini juga lebih rendah dibandingkan capaian indeks pada dimensi kesehatan, gizi, maupun perumahan.

.....
*Dimensi pendidikan
dan dimensi perlindungan sosial
merupakan dua dimensi yang perlu
mendapat perhatian lebih
dalam upaya percepatan
penurunan stunting di Kota Balikpapan.*
.....

Apabila dilihat pada level indikator, capaian indeks indikator ASI eksklusif pada tahun 2020 maupun 2021 untuk Kota Balikpapan telah mencapai angka 100 poin. Hal ini berarti estimasi indikator tersebut telah mencapai nilai maksimal yang ditentukan. Sebagai catatan, nilai maksimal yang ditentukan untuk indikator ASI eksklusif adalah 80 (Tabel 2.2). Dengan kata lain, persentase bayi usia kurang dari 6 (enam) bulan yang mendapatkan ASI eksklusif di Kota Balikpapan pada tahun 2020 dan 2021 lebih atau sama dengan 80 persen. Walaupun telah mencapai angka maksimal, namun tidak berarti pemerintah daerah dapat meninggalkan upaya intervensi percepatan penurunan *stunting* pada indikator tersebut.

Gambar 3.6
IKPS Kota Balikpapan Menurut Dimensi, 2020-2021



Tabel 3.4
Indeks Dimensi dan Indikator Penyusun IKPS Kota Balikpapan, 2020-2021

Dimensi/Indikator	Indeks		
	2020	2021	Selisih
(1)	(2)	(3)	(4)
Dimensi kesehatan	80,5	78,8	-1,7
Imunisasi	81,6	82,9	1,3
Penolong persalinan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan KB modern	99,4	98,5	-0,9
	60,6	54,8	-5,8
Dimensi gizi	91,4	94,9	3,5
ASI eksklusif	100,0	100,0	0,0
MP ASI	82,8	89,8	7,0
Dimensi perumahan	94,6	96,5	1,9
Air minum layak	98,2	99,7	1,5
Sanitasi layak	90,9	93,3	2,4
Dimensi pendidikan	26,7	21,8	-4,9
PAUD	26,7	21,8	-4,9
Dimensi perlindungan sosial	51,1	46,3	-4,8
Kepemilikan JKN/jamkesda	79,6	79,3	-0,3
Penerima KPS/KKS atau bantuan pangan	22,6	13,3	-9,3
IKPS	68,9	67,6	-1,3

Sejalan dengan hal tersebut, untuk indikator yang nilai indeksnya masih relatif rendah, diperlukan upaya yang lebih giat untuk menaikkan capaian indeks pada indikator-indikator tersebut. Peningkatan capaian IKPS pada diharapkan tidak hanya berpengaruh secara nominal pada peningkatan IKPS Kota Balikpapan pada tahun-tahun berikutnya, namun lebih pada semakin dekatnya pencapaian tujuan percepatan penurunan *stunting* di wilayah tersebut.

Hal penting yang perlu diperhatikan dalam melakukan interpretasi dari indeks indikator penyusun IKPS adalah terkait dengan RSE. Apabila RSE indikator penyusun IKPS 25 persen hingga 50 persen, pengguna data harus berhati-hati dalam menggunakan nilai estimasi dari indikator tersebut. Adapun jika RSE indikator penyusun IKPS lebih dari 50 persen, maka nilai indikator dianggap tidak akurat.

.....

Capaian indikator dan dimensi yang masih rendah menggambarkan masih diperlukannya upaya yang lebih giat dalam menjalankan berbagai intervensi terkait indikator dan dimensi penyusun IKPS tersebut. Adapun yang capaiannya sudah baik, bukan berarti berbagai pihak yang terlibat dapat menurunkan kinerja berbagai program intervensi terkait indikator dan dimensi penyusun IKPS tersebut.

.....

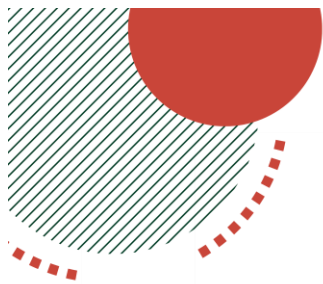
Sebagai contoh, RSE untuk indikator ASI eksklusif tahun 2021 untuk Kabupaten Mahakam Hulu sebesar 30,0 (Lampiran 3.3) yang berarti pengguna data harus berhati-hati dalam menggunakan indikator tersebut.

<https://www.bps.go.id>



DAFTAR PUSTAKA

- Australian Bureau of Statistics. (2017) 4906.0.55.003 - Personal Safety Survey, Australia: User Guide, 2016. <https://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/Lookup/4906.0.55.003main+features262016>.
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Buku 4 Konsep dan Definisi Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2021*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Blinder, R., Biller, O., Even, A., Sofer, O., Tractinsky, N., Lanir, J., & Bak, P. (2019). Comparative evaluation of node-link and sankey diagrams for the cyber security domain. *In IFIP Conference on Human-Computer Interaction* (pp. 497-518). Springer, Cham.
- Çetinkaya-Rundel, M. & Hardin, J. Modern Statistical Methods for Psychology. https://bookdown.org/gregcox7/ims_psych/foundations-bootstrapping.html
- Nshakira-Rukundo, E., Mussa, E.C., Gerber, N., & Braun, J.V. (2020). Impact of voluntary community-based health insurance on child *stunting*. Evidence from rural Uganda. *Social Science & Medicine*. 245. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2019.112738>.
- Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia dan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. (2019). *Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (Stunting) Periode 2018-2024*. Jakarta: Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia.
- Tim Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (*Stunting*). (2022). "Tahun 2022 Angka Prevalensi *Stunting* Harus Turun Setidaknya 3%". Diakses dari <https://stunting.go.id/tahun-2022-angka-prevalensi-stunting-harus-turun-setidaknya-3/>



LAMPIRAN

<https://www.bps.go.id>

Lampiran 1.1
Capaian IKPS Menurut Komponen Penyusun,
2018-2021

Indikator/Dimensi/IKPS	Indeks			
	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Imunisasi	64,9	61,5	63,5	67,9
Penolong persalinan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan	82,6	85,9	87,8	88,8
KB modern	71,4	68,2	67,9	67,2
ASI eksklusif	55,4	83,4	87,0	89,5
MP ASI	80,7	77,3	83,3	83,3
Air minum layak	87,7	89,3	90,2	90,8
Sanitasi layak	74,6	77,4	79,5	80,3
Mengalami kerawanan pangan	88,6	91,0	91,5	92,0
Ketidacukupan konsumsi pangan	86,8	87,3	86,1	85,9
PAUD	42,1	41,0	41,7	39,5
Kepemilikan JKN/Jamkesda	60,6	62,8	66,4	65,7
Penerima KPS/KKS atau bantuan pangan	75,4	49,4	39,0	42,6
Dimensi kesehatan	73,0	71,8	73,1	74,6
Dimensi gizi	68,1	80,3	85,1	86,4
Dimensi perumahan	81,2	83,3	84,9	85,5
Dimensi pangan	87,7	89,1	88,8	88,9
Dimensi pendidikan	42,1	41,0	41,7	39,5
Dimensi perlindungan sosial	68,0	56,1	52,7	54,2
IKPS	70,0	70,3	71,0	71,5

Lampiran 2.1
Capaian IKPS Provinsi Aceh
Menurut Komponen Penyusun, 2018-2021

Indikator/Dimensi/IKPS	Indeks			
	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Imunisasi	21,4	23,0	24,8	25,3
Penolong persalinan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan	86,1	88,7	90,0	91,1
KB modern	56,8	56,2	54,3	53,2
ASI eksklusif	41,7	78,5	81,8	83,3
MP ASI	76,9	80,2	81,6	78,8
Air minum layak	82,6	85,8	87,7	88,8
Sanitasi layak	69,7	73,2	77,1	77,5
Ketidakcukupan konsumsi pangan	85,6	84,4	85,7	88,5
PAUD	35,3	35,3	32,5	36,3
Kepemilikan JKN/Jamkesda	91,9	94,5	96,4	96,3
Penerima KPS/KKS atau bantuan pangan	99,5	83,3	49,2	48,9
Dimensi kesehatan	54,8	56,0	56,4	56,5
Dimensi gizi	59,3	79,3	81,7	81,0
Dimensi perumahan	76,2	79,5	82,4	83,2
Dimensi pangan	85,6	84,4	85,7	88,5
Dimensi pendidikan	35,3	35,3	32,5	36,3
Dimensi perlindungan sosial	95,7	88,9	72,8	72,6
IKPS	67,8	70,6	68,6	69,7

Lampiran 2.2
Capaian IKPS Provinsi Sumatera Utara
Menurut Komponen Penyusun, 2018-2021

Indikator/Dimensi/IKPS	Indeks			
	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Imunisasi	38,0	43,2	43,8	46,9
Penolong persalinan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan	72,7	78,4	83,5	87,2
KB modern	56,6	50,9	52,1	48,5
ASI eksklusif	32,1	62,7	66,7	72,3
MP ASI	72,3	73,2	69,5	69,0
Air minum layak	87,5	90,2	89,7	90,9
Sanitasi layak	77,4	79,6	81,1	82,0
Ketidakcukupan konsumsi pangan	90,5	92,0	88,8	89,5
PAUD	27,0	25,9	27,2	25,0
Kepemilikan JKN/Jamkesda	49,3	54,7	59,1	57,4
Penerima KPS/KKS atau bantuan pangan	66,4	47,7	34,8	33,0
Dimensi kesehatan	55,7	57,5	59,8	60,9
Dimensi gizi	52,2	68,0	68,1	70,6
Dimensi perumahan	82,4	84,9	85,4	86,5
Dimensi pangan	90,5	92,0	88,8	89,5
Dimensi pendidikan	27,0	25,9	27,2	25,0
Dimensi perlindungan sosial	57,8	51,2	47,0	45,2
IKPS	60,9	63,2	62,7	62,9

Lampiran 2.3
Capaian IKPS Provinsi Sumatera Barat
Menurut Komponen Penyusun, 2018-2021

Indikator/Dimensi/IKPS	Indeks			
	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Imunisasi	42,7	53,1	52,2	42,9
Penolong persalinan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan	91,8	92,6	94,8	93,2
KB modern	56,7	57,8	56,1	54,8
ASI eksklusif	63,0	86,5	87,9	92,7
MP ASI	89,1	81,5	93,7	92,9
Air minum layak	80,5	81,4	83,4	83,4
Sanitasi layak	62,5	64,0	68,1	68,7
Ketidakcukupan konsumsi pangan	90,9	91,9	90,2	90,0
PAUD	33,6	33,8	33,2	30,6
Kepemilikan JKN/Jamkesda	66,1	66,9	69,1	68,3
Penerima KPS/KKS atau bantuan pangan	55,4	47,0	35,4	34,7
Dimensi kesehatan	63,7	67,8	67,7	63,6
Dimensi gizi	76,0	84,0	90,8	92,8
Dimensi perumahan	71,5	72,7	75,7	76,0
Dimensi pangan	90,9	91,9	90,2	90,0
Dimensi pendidikan	33,6	33,8	33,2	30,6
Dimensi perlindungan sosial	60,8	56,9	52,3	51,5
IKPS	66,1	67,9	68,3	67,4

Lampiran 2.4
Capaian IKPS Provinsi Riau
Menurut Komponen Penyusun, 2018-2021

Indikator/Dimensi/IKPS	Indeks			
	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Imunisasi	39,7	38,0	43,1	49,9
Penolong persalinan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan	71,2	74,4	78,7	81,8
KB modern	64,5	61,5	60,6	59,8
ASI eksklusif	45,4	75,9	81,5	87,9
MP ASI	85,9	84,1	86,9	85,9
Air minum layak	87,7	87,4	88,3	89,8
Sanitasi layak	80,1	80,0	84,0	83,6
Ketidakcukupan konsumsi pangan	84,0	86,2	84,7	82,3
PAUD	32,6	28,6	28,5	26,3
Kepemilikan JKN/Jamkesda	52,6	56,5	63,5	61,6
Penerima KPS/KKS atau bantuan pangan	52,3	40,5	25,8	26,1
Dimensi kesehatan	58,5	58,0	60,8	63,9
Dimensi gizi	65,6	80,0	84,2	86,9
Dimensi perumahan	83,9	83,7	86,1	86,7
Dimensi pangan	84,0	86,2	84,7	82,3
Dimensi pendidikan	32,6	28,6	28,5	26,3
Dimensi perlindungan sosial	52,4	48,5	44,7	43,8
IKPS	62,8	64,2	64,8	65,0

Lampiran 2.5
Capaian IKPS Provinsi Jambi
Menurut Komponen Penyusun, 2018-2021

Indikator/Dimensi/IKPS	Indeks			
	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Imunisasi	72,3	58,4	56,0	59,6
Penolong persalinan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan	59,6	65,6	70,5	73,1
KB modern	76,8	77,1	76,9	76,9
ASI eksklusif	78,3	81,1	81,5	89,2
MP ASI	83,6	80,6	84,3	79,4
Air minum layak	75,3	76,9	78,9	79,7
Sanitasi layak	73,7	75,6	77,8	80,4
Ketidakcukupan konsumsi pangan	83,3	85,1	84,8	84,6
PAUD	35,2	33,5	36,6	34,0
Kepemilikan JKN/Jamkesda	46,0	50,6	50,1	49,2
Penerima KPS/KKS atau bantuan pangan	61,2	42,6	23,7	20,8
Dimensi kesehatan	69,6	67,0	67,8	69,9
Dimensi gizi	81,0	80,8	82,9	84,3
Dimensi perumahan	74,5	76,3	78,3	80,0
Dimensi pangan	83,3	85,1	84,8	84,6
Dimensi pendidikan	35,2	33,5	36,6	34,0
Dimensi perlindungan sosial	53,6	46,6	36,9	35,0
IKPS	66,2	64,9	64,6	64,6

Lampiran 2.6
Capaian IKPS Provinsi Sumatera Selatan
Menurut Komponen Penyusun, 2018-2021

Indikator/Dimensi/IKPS	Indeks			
	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Imunisasi	53,2	46,9	50,4	59,4
Penolong persalinan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan	73,2	78,8	82,5	82,8
KB modern	80,2	78,7	77,6	76,9
ASI eksklusif	51,9	80,5	85,1	87,4
MP ASI	79,3	81,6	83,4	82,6
Air minum layak	80,6	80,4	80,8	84,7
Sanitasi layak	72,1	74,7	76,9	77,3
Ketidakcukupan konsumsi pangan	81,9	84,9	83,7	88,6
PAUD	28,3	27,2	29,2	26,9
Kepemilikan JKN/Jamkesda	83,0	56,1	59,5	58,5
Penerima KPS/KKS atau bantuan pangan	61,6	47,7	29,8	32,0
Dimensi kesehatan	68,9	68,1	70,2	73,0
Dimensi gizi	65,6	81,0	84,3	85,0
Dimensi perumahan	76,3	77,5	78,9	81,0
Dimensi pangan	81,9	84,9	83,7	88,6
Dimensi pendidikan	28,3	27,2	29,2	26,9
Dimensi perlindungan sosial	72,3	51,9	44,7	45,3
IKPS	65,6	65,1	65,1	66,7

Lampiran 2.7
Capaian IKPS Provinsi Bengkulu
Menurut Komponen Penyusun, 2018-2021

Indikator/Dimensi/IKPS	Indeks			
	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Imunisasi	73,1	63,7	67,0	80,1
Penolong persalinan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan	63,8	72,2	80,5	81,3
KB modern	79,8	79,1	77,0	75,5
ASI eksklusif	58,5	76,1	77,9	83,9
MP ASI	81,2	82,5	91,5	89,5
Air minum layak	61,2	57,6	62,5	67,4
Sanitasi layak	71,8	75,9	78,1	79,8
Ketidakcukupan konsumsi pangan	85,5	87,2	87,1	85,6
PAUD	32,0	31,0	31,6	29,5
Kepemilikan JKN/Jamkesda	54,5	58,0	62,7	62,6
Penerima KPS/KKS atau bantuan pangan	71,6	52,4	41,8	43,9
Dimensi kesehatan	72,2	71,7	74,8	79,0
Dimensi gizi	69,8	79,3	84,7	86,7
Dimensi perumahan	66,5	66,8	70,3	73,6
Dimensi pangan	85,5	87,2	87,1	85,6
Dimensi pendidikan	32,0	31,0	31,6	29,5
Dimensi perlindungan sosial	63,0	55,2	52,2	53,3
IKPS	64,8	65,2	66,8	67,9

Lampiran 2.8
Capaian IKPS Provinsi Lampung
Menurut Komponen Penyusun, 2018-2021

Indikator/Dimensi/IKPS	Indeks			
	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Imunisasi	74,1	70,9	72,6	79,2
Penolong persalinan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan	85,0	86,6	88,9	92,3
KB modern	81,4	78,7	75,8	78,4
ASI eksklusif	55,7	83,5	90,5	93,7
MP ASI	81,7	81,2	86,2	91,6
Air minum layak	66,2	73,3	75,0	80,2
Sanitasi layak	75,2	79,2	78,8	83,9
Ketidakcukupan konsumsi pangan	79,8	82,5	79,7	82,9
PAUD	36,9	37,1	39,0	36,1
Kepemilikan JKN/Jamkesda	52,1	55,4	70,4	69,3
Penerima KPS/KKS atau bantuan pangan	84,8	65,6	42,3	47,6
Dimensi kesehatan	80,2	78,7	79,1	83,3
Dimensi gizi	68,7	82,4	88,3	92,6
Dimensi perumahan	70,7	76,3	76,9	82,0
Dimensi pangan	79,8	82,5	79,7	82,9
Dimensi pendidikan	36,9	37,1	39,0	36,1
Dimensi perlindungan sosial	68,4	60,5	56,4	58,4
IKPS	67,5	69,6	69,9	72,6

Lampiran 2.9
Capaian IKPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Menurut Komponen Penyusun, 2018-2021

Indikator/Dimensi/IKPS	Indeks			
	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Imunisasi	83,3	66,6	69,0	77,6
Penolong persalinan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan	88,0	91,0	95,7	95,4
KB modern	79,5	76,4	75,7	78,4
ASI eksklusif	43,2	49,6	69,3	78,7
MP ASI	79,9	64,8	64,1	75,3
Air minum layak	73,2	73,5	75,1	73,4
Sanitasi layak	88,0	90,3	92,6	92,2
Ketidakcukupan konsumsi pangan	83,2	86,9	84,4	81,6
PAUD	40,1	36,6	37,6	35,3
Kepemilikan JKN/Jamkesda	65,0	62,2	66,2	67,3
Penerima KPS/KKS atau bantuan pangan	30,1	24,3	18,9	22,6
Dimensi kesehatan	83,6	78,0	80,1	83,8
Dimensi gizi	61,5	57,2	66,7	77,0
Dimensi perumahan	80,6	81,9	83,8	82,8
Dimensi pangan	83,2	86,9	84,4	81,6
Dimensi pendidikan	40,1	36,6	37,6	35,3
Dimensi perlindungan sosial	47,6	43,3	42,6	44,9
IKPS	66,1	64,0	65,9	67,6

Lampiran 2.10
Capaian IKPS Provinsi Kepulauan Riau
Menurut Komponen Penyusun, 2018-2021

Indikator/Dimensi/IKPS	Indeks			
	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Imunisasi	88,1	68,5	70,4	75,3
Penolong persalinan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan	92,3	92,4	94,3	95,8
KB modern	55,7	46,9	48,3	47,4
ASI eksklusif	67,3	71,6	74,4	73,6
MP ASI	61,2	55,8	59,8	66,2
Air minum layak	87,0	88,5	90,4	90,8
Sanitasi layak	85,9	89,1	89,2	91,6
Ketidakcukupan konsumsi pangan	92,7	93,2	89,9	87,1
PAUD	31,5	32,1	33,6	31,0
Kepemilikan JKN/Jamkesda	54,7	60,7	72,5	70,9
Penerima KPS/KKS atau bantuan pangan	34,6	27,3	23,3	17,7
Dimensi kesehatan	78,7	69,3	71,0	72,8
Dimensi gizi	64,3	63,7	67,1	69,9
Dimensi perumahan	86,4	88,8	89,8	91,2
Dimensi pangan	92,7	93,2	89,9	87,1
Dimensi pendidikan	31,5	32,1	33,6	31,0
Dimensi perlindungan sosial	44,7	44,0	47,9	44,3
IKPS	66,4	65,2	66,5	66,1

Lampiran 2.11
Capaian IKPS Provinsi DKI Jakarta
Menurut Komponen Penyusun, 2018-2021

Indikator/Dimensi/IKPS	Indeks			
	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Imunisasi	77,1	64,5	67,1	69,0
Penolong persalinan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan	97,2	98,8	99,2	99,3
KB modern	62,7	60,5	58,8	57,3
ASI eksklusif	57,1	85,1	88,6	82,0
MP ASI	73,4	71,5	74,7	86,4
Air minum layak	96,1	99,8	99,8	99,9
Sanitasi layak	90,7	92,9	93,0	95,2
Ketidakcukupan konsumsi pangan	97,6	97,6	96,8	96,3
PAUD	44,2	47,9	43,8	40,8
Kepemilikan JKN/Jamkesda	77,0	82,9	85,4	85,6
Penerima KPS/KKS atau bantuan pangan	16,8	11,8	11,8	17,7
Dimensi kesehatan	79,0	74,6	75,0	75,2
Dimensi gizi	65,2	78,3	81,6	84,2
Dimensi perumahan	93,4	96,4	96,4	97,5
Dimensi pangan	97,6	97,6	96,8	96,3
Dimensi pendidikan	44,2	47,9	43,8	40,8
Dimensi perlindungan sosial	46,9	47,4	48,6	51,6
IKPS	71,0	73,7	73,7	74,3

Lampiran 2.12
Capaian IKPS Provinsi Jawa Barat
Menurut Komponen Penyusun, 2018-2021

Indikator/Dimensi/IKPS	Indeks			
	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Imunisasi	64,4	56,5	60,4	62,5
Penolong persalinan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan	82,2	85,2	86,7	84,8
KB modern	78,8	73,0	72,5	70,7
ASI eksklusif	55,8	88,9	95,1	95,6
MP ASI	83,0	74,4	89,4	84,7
Air minum layak	89,5	92,3	93,4	93,2
Sanitasi layak	67,6	69,6	71,4	71,7
Ketidakcukupan konsumsi pangan	93,7	93,9	93,5	92,6
PAUD	39,9	39,1	39,4	36,7
Kepemilikan JKN/Jamkesda	56,0	58,4	59,6	58,5
Penerima KPS/KKS atau bantuan pangan	80,6	41,0	35,8	39,1
Dimensi kesehatan	75,1	71,5	73,2	72,7
Dimensi gizi	69,4	81,6	92,3	90,1
Dimensi perumahan	78,6	81,0	82,4	82,4
Dimensi pangan	93,7	93,9	93,5	92,6
Dimensi pendidikan	39,9	39,1	39,4	36,7
Dimensi perlindungan sosial	68,3	49,7	47,7	48,8
IKPS	70,8	69,5	71,4	70,6

Lampiran 2.13
Capaian IKPS Provinsi Jawa Tengah
Menurut Komponen Penyusun, 2018-2021

Indikator/Dimensi/IKPS	Indeks			
	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Imunisasi	83,7	82,4	81,9	85,0
Penolong persalinan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan	96,7	98,1	98,1	97,8
KB modern	72,3	70,6	70,7	70,2
ASI eksklusif	63,2	90,0	95,4	98,7
MP ASI	91,7	87,8	97,0	96,2
Air minum layak	92,4	93,8	94,1	93,6
Sanitasi layak	78,2	80,3	83,2	83,3
Ketidakcukupan konsumsi pangan	81,3	80,7	80,3	79,4
PAUD	55,3	54,1	55,8	52,6
Kepemilikan JKN/Jamkesda	63,4	68,0	69,4	68,5
Penerima KPS/KKS atau bantuan pangan	84,4	49,7	47,2	53,1
Dimensi kesehatan	84,2	83,7	83,6	84,3
Dimensi gizi	77,4	88,9	96,2	97,4
Dimensi perumahan	85,3	87,1	88,7	88,4
Dimensi pangan	81,3	80,7	80,3	79,4
Dimensi pendidikan	55,3	54,1	55,8	52,6
Dimensi perlindungan sosial	73,9	58,8	58,3	60,8
IKPS	76,2	75,5	77,1	77,2

Lampiran 2.14
Capaian IKPS Provinsi DI Yogyakarta
Menurut Komponen Penyusun, 2018-2021

Indikator/Dimensi/IKPS	Indeks			
	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Imunisasi	96,8	88,6	85,3	81,2
Penolong persalinan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan	99,0	99,8	99,8	98,7
KB modern	65,4	63,3	61,4	58,4
ASI eksklusif	69,6	93,6	98,7	96,3
MP ASI	95,1	92,2	97,0	100,0
Air minum layak	94,1	94,9	96,0	95,7
Sanitasi layak	92,0	94,7	97,0	97,1
Ketidakcukupan konsumsi pangan	85,5	87,8	83,5	83,0
PAUD	77,6	75,3	75,0	72,0
Kepemilikan JKN/Jamkesda	77,0	77,0	79,9	78,1
Penerima KPS/KKS atau bantuan pangan	84,0	61,5	56,7	66,5
Dimensi kesehatan	87,1	83,9	82,2	79,4
Dimensi gizi	82,4	92,9	97,8	98,1
Dimensi perumahan	93,1	94,8	96,5	96,4
Dimensi pangan	85,5	87,8	83,5	83,0
Dimensi pendidikan	77,6	75,3	75,0	72,0
Dimensi perlindungan sosial	80,5	69,3	68,3	72,3
IKPS	84,3	84,0	83,9	83,5

Lampiran 2.15
Capaian IKPS Provinsi Jawa Timur
Menurut Komponen Penyusun, 2018-2021

Indikator/Dimensi/IKPS	Indeks			
	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Imunisasi	76,2	74,0	73,5	77,5
Penolong persalinan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan	93,6	95,1	95,9	96,4
KB modern	77,0	73,5	74,2	75,4
ASI eksklusif	51,0	85,9	83,6	87,0
MP ASI	77,7	71,9	80,7	82,0
Air minum layak	93,7	94,4	95,6	95,0
Sanitasi layak	74,3	78,8	81,0	81,0
Ketidakcukupan konsumsi pangan	87,7	87,6	85,7	84,8
PAUD	63,2	61,9	62,5	59,3
Kepemilikan JKN/Jamkesda	56,8	55,9	62,0	61,4
Penerima KPS/KKS atau bantuan pangan	76,5	46,7	43,9	48,5
Dimensi kesehatan	82,3	80,9	81,2	83,1
Dimensi gizi	64,4	78,9	82,2	84,5
Dimensi perumahan	84,0	86,6	88,3	88,0
Dimensi pangan	87,7	87,6	85,7	84,8
Dimensi pendidikan	63,2	61,9	62,5	59,3
Dimensi perlindungan sosial	66,6	51,3	52,9	54,9
IKPS	74,7	74,5	75,5	75,8

Lampiran 2.16
Capaian IKPS Provinsi Banten
Menurut Komponen Penyusun, 2018-2021

Indikator/Dimensi/IKPS	Indeks			
	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Imunisasi	53,6	44,5	48,6	57,7
Penolong persalinan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan	79,3	83,3	86,6	87,4
KB modern	76,3	70,4	71,4	72,3
ASI eksklusif	46,0	80,7	86,0	89,0
MP ASI	77,0	72,4	72,2	73,8
Air minum layak	90,6	91,6	92,9	93,5
Sanitasi layak	77,5	81,0	82,0	82,9
Ketidakcukupan konsumsi pangan	95,1	96,5	96,5	95,3
PAUD	33,1	31,6	33,8	30,6
Kepemilikan JKN/Jamkesda	55,6	59,4	61,5	61,3
Penerima KPS/KKS atau bantuan pangan	69,9	54,3	30,4	30,3
Dimensi kesehatan	69,7	66,1	68,9	72,5
Dimensi gizi	61,5	76,6	79,1	81,4
Dimensi perumahan	84,0	86,3	87,4	88,2
Dimensi pangan	95,1	96,5	96,5	95,3
Dimensi pendidikan	33,1	31,6	33,8	30,6
Dimensi perlindungan sosial	62,8	56,9	46,0	45,8
IKPS	67,7	69,0	68,6	69,0

Lampiran 2.17
Capaian IKPS Provinsi Bali
Menurut Komponen Penyusun, 2018-2021

Indikator/Dimensi/IKPS	Indeks			
	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Imunisasi	100,0	86,4	90,5	92,0
Penolong persalinan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan	99,9	99,8	98,3	99,9
KB modern	72,5	67,6	61,9	64,2
ASI eksklusif	33,9	87,3	81,1	85,6
MP ASI	78,6	68,9	80,4	74,3
Air minum layak	96,4	96,8	97,4	97,6
Sanitasi layak	91,6	94,6	95,0	96,0
Ketidakcukupan konsumsi pangan	95,5	95,2	93,3	87,6
PAUD	39,4	35,9	35,3	33,0
Kepemilikan JKN/Jamkesda	58,8	70,5	76,5	78,5
Penerima KPS/KKS atau bantuan pangan	39,2	28,7	25,9	29,6
Dimensi kesehatan	90,8	84,6	83,6	85,4
Dimensi gizi	56,2	78,1	80,8	80,0
Dimensi perumahan	94,0	95,7	96,2	96,8
Dimensi pangan	95,5	95,2	93,3	87,6
Dimensi pendidikan	39,4	35,9	35,3	33,0
Dimensi perlindungan sosial	49,0	49,6	51,2	54,1
IKPS	70,8	73,2	73,4	72,8

Lampiran 2.18
Capaian IKPS Provinsi Nusa Tenggara Barat
Menurut Komponen Penyusun, 2018-2021

Indikator/Dimensi/IKPS	Indeks			
	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Imunisasi	79,9	82,8	81,5	75,2
Penolong persalinan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan	89,2	92,9	93,9	96,1
KB modern	67,6	66,5	69,7	68,0
ASI eksklusif	80,3	93,7	92,2	100,0
MP ASI	95,4	85,6	97,6	100,0
Air minum layak	94,4	93,9	94,1	94,6
Sanitasi layak	75,7	80,0	82,9	82,9
Ketidakcukupan konsumsi pangan	90,1	95,4	95,0	97,0
PAUD	44,8	47,0	47,2	45,6
Kepemilikan JKN/Jamkesda	54,8	57,0	60,9	61,3
Penerima KPS/KKS atau bantuan pangan	96,1	80,3	50,3	51,7
Dimensi kesehatan	78,9	80,7	81,7	79,8
Dimensi gizi	87,9	89,6	94,9	100,0
Dimensi perumahan	85,0	87,0	88,5	88,7
Dimensi pangan	90,1	95,4	95,0	97,0
Dimensi pendidikan	44,8	47,0	47,2	45,6
Dimensi perlindungan sosial	75,4	68,6	55,6	56,5
IKPS	77,0	78,1	77,2	77,9

Lampiran 2.19
Capaian IKPS Provinsi Nusa Tenggara Timur
Menurut Komponen Penyusun, 2018-2021

Indikator/Dimensi/IKPS	Indeks			
	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Imunisasi	58,0	64,8	68,8	81,7
Penolong persalinan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan	76,3	79,1	80,6	84,9
KB modern	48,4	49,3	49,4	48,2
ASI eksklusif	77,7	93,8	95,5	100,0
MP ASI	77,0	82,7	84,5	82,8
Air minum layak	81,3	82,3	83,9	85,4
Sanitasi layak	61,8	64,6	69,7	73,4
Ketidakcukupan konsumsi pangan	77,7	76,6	78,1	80,3
PAUD	36,2	34,3	36,4	36,2
Kepemilikan JKN/Jamkesda	61,7	64,2	65,5	67,5
Penerima KPS/KKS atau bantuan pangan	84,1	79,3	57,0	55,7
Dimensi kesehatan	60,9	64,4	66,2	71,6
Dimensi gizi	77,4	88,3	90,0	91,4
Dimensi perumahan	71,5	73,5	76,8	79,4
Dimensi pangan	77,7	76,6	78,1	80,3
Dimensi pendidikan	36,2	34,3	36,4	36,2
Dimensi perlindungan sosial	72,9	71,7	61,2	61,6
IKPS	66,1	68,1	68,1	70,1

Lampiran 2.20
Capaian IKPS Provinsi Kalimantan Barat
Menurut Komponen Penyusun, 2018-2021

Indikator/Dimensi/IKPS	Indeks			
	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Imunisasi	55,6	55,2	56,4	61,6
Penolong persalinan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan	64,8	71,8	72,7	77,5
KB modern	79,1	76,5	77,3	77,0
ASI eksklusif	64,2	74,3	83,0	89,0
MP ASI	80,9	88,1	85,5	81,9
Air minum layak	77,8	77,1	78,8	78,8
Sanitasi layak	72,4	72,1	75,8	78,4
Ketidakcukupan konsumsi pangan	68,9	68,2	66,8	67,3
PAUD	25,0	23,2	25,2	24,1
Kepemilikan JKN/Jamkesda	42,6	50,2	59,8	61,9
Penerima KPS/KKS atau bantuan pangan	54,3	45,9	24,8	31,7
Dimensi kesehatan	66,5	67,9	68,8	72,1
Dimensi gizi	72,5	81,2	84,3	85,5
Dimensi perumahan	75,1	74,6	77,3	78,6
Dimensi pangan	68,9	68,2	66,8	67,3
Dimensi pendidikan	25,0	23,2	25,2	24,1
Dimensi perlindungan sosial	48,5	48,1	42,3	46,8
IKPS	59,4	60,5	60,8	62,4

Lampiran 2.21
Capaian IKPS Provinsi Kalimantan Tengah
Menurut Komponen Penyusun, 2018-2021

Indikator/Dimensi/IKPS	Indeks			
	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Imunisasi	49,9	55,0	56,5	59,3
Penolong persalinan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan	47,6	56,8	57,8	63,1
KB modern	81,2	80,4	81,4	77,8
ASI eksklusif	55,1	63,1	66,2	70,0
MP ASI	83,8	79,9	77,0	75,0
Air minum layak	71,7	73,3	74,9	77,0
Sanitasi layak	66,8	69,2	72,3	73,8
Ketidakcukupan konsumsi pangan	85,5	84,4	83,2	85,2
PAUD	42,1	39,1	41,4	39,8
Kepemilikan JKN/Jamkesda	54,5	53,4	61,6	60,0
Penerima KPS/KKS atau bantuan pangan	34,7	20,9	19,1	20,0
Dimensi kesehatan	59,6	64,1	65,2	66,7
Dimensi gizi	69,5	71,5	71,6	72,5
Dimensi perumahan	69,3	71,3	73,6	75,4
Dimensi pangan	85,5	84,4	83,2	85,2
Dimensi pendidikan	42,1	39,1	41,4	39,8
Dimensi perlindungan sosial	44,6	37,2	40,3	40,0
IKPS	61,8	61,2	62,5	63,3

Lampiran 2.22
Capaian IKPS Provinsi Kalimantan Selatan
Menurut Komponen Penyusun, 2018-2021

Indikator/Dimensi/IKPS	Indeks			
	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Imunisasi	75,7	67,4	70,9	77,0
Penolong persalinan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan	77,3	77,4	80,4	83,5
KB modern	81,9	83,9	85,7	84,7
ASI eksklusif	50,9	82,5	79,4	75,3
MP ASI	74,1	79,7	89,2	88,9
Air minum layak	68,4	69,4	70,4	76,4
Sanitasi layak	73,2	76,6	81,2	81,4
Ketidakcukupan konsumsi pangan	95,6	95,8	95,5	95,4
PAUD	52,5	47,0	50,8	48,7
Kepemilikan JKN/Jamkesda	62,9	75,0	72,3	69,2
Penerima KPS/KKS atau bantuan pangan	50,4	39,8	29,1	29,1
Dimensi kesehatan	78,3	76,2	79,0	81,7
Dimensi gizi	62,5	81,1	84,3	82,1
Dimensi perumahan	70,8	73,0	75,8	78,9
Dimensi pangan	95,6	95,8	95,5	95,4
Dimensi pendidikan	52,5	47,0	50,8	48,7
Dimensi perlindungan sosial	56,7	57,4	50,7	49,1
IKPS	69,4	71,8	72,7	72,7

Lampiran 2.23
Capaian IKPS Provinsi Kalimantan Timur
Menurut Komponen Penyusun, 2018-2021

Indikator/Dimensi/IKPS	Indeks			
	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Imunisasi	82,9	66,5	70,6	79,3
Penolong persalinan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan	87,3	89,3	90,5	92,1
KB modern	69,7	64,5	62,9	60,9
ASI eksklusif	73,7	88,8	88,9	94,8
MP ASI	61,7	78,1	79,2	86,0
Air minum layak	82,9	83,5	85,5	85,8
Sanitasi layak	84,1	89,3	89,2	89,8
Ketidakcukupan konsumsi pangan	83,1	88,4	86,3	79,1
PAUD	35,8	32,8	31,9	28,9
Kepemilikan JKN/Jamkesda	64,0	67,5	70,7	70,4
Penerima KPS/KKS atau bantuan pangan	39,3	29,7	27,4	24,8
Dimensi kesehatan	80,0	73,5	74,7	77,4
Dimensi gizi	67,7	83,5	84,1	90,4
Dimensi perumahan	83,5	86,4	87,3	87,8
Dimensi pangan	83,1	88,4	86,3	79,1
Dimensi pendidikan	35,8	32,8	31,9	28,9
Dimensi perlindungan sosial	51,7	48,6	49,0	47,6
IKPS	67,0	68,9	68,9	68,5

Lampiran 2.24
Capaian IKPS Provinsi Kalimantan Utara
Menurut Komponen Penyusun, 2018-2021

Indikator/Dimensi/IKPS	Indeks			
	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Imunisasi	81,2	63,7	65,0	78,9
Penolong persalinan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan	84,3	90,2	90,0	92,6
KB modern	60,1	58,6	60,1	52,6
ASI eksklusif	57,8	96,2	96,2	100,0
MP ASI	75,5	70,5	73,0	72,3
Air minum layak	89,5	87,9	89,5	86,8
Sanitasi layak	81,7	77,2	82,1	79,8
Ketidakcukupan konsumsi pangan	81,6	83,2	79,8	78,8
PAUD	36,4	33,5	38,8	36,1
Kepemilikan JKN/Jamkesda	74,9	81,4	81,4	78,1
Penerima KPS/KKS atau bantuan pangan	42,1	34,0	27,6	33,5
Dimensi kesehatan	75,2	70,9	71,7	74,7
Dimensi gizi	66,7	83,4	84,6	86,2
Dimensi perumahan	85,6	82,6	85,8	83,3
Dimensi pangan	81,6	83,2	79,8	78,8
Dimensi pendidikan	36,4	33,5	38,8	36,1
Dimensi perlindungan sosial	58,5	57,7	54,5	55,8
IKPS	67,3	68,5	69,2	69,1

Lampiran 2.25
Capaian IKPS Provinsi Sulawesi Utara
Menurut Komponen Penyusun, 2018-2021

Indikator/Dimensi/IKPS	Indeks			
	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Imunisasi	65,8	70,1	73,9	77,4
Penolong persalinan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan	83,7	89,1	91,4	89,8
KB modern	77,2	76,5	76,2	72,8
ASI eksklusif	42,0	68,7	73,2	76,4
MP ASI	68,0	56,2	60,0	59,8
Air minum layak	88,7	90,8	90,3	91,6
Sanitasi layak	79,3	82,4	85,5	84,9
Ketidakcukupan konsumsi pangan	94,8	93,4	92,5	88,5
PAUD	35,3	34,1	36,5	33,8
Kepemilikan JKN/Jamkesda	64,9	72,7	75,2	74,2
Penerima KPS/KKS atau bantuan pangan	73,6	55,5	40,5	40,7
Dimensi kesehatan	75,6	78,6	80,5	80,0
Dimensi gizi	55,0	62,4	66,6	68,1
Dimensi perumahan	84,0	86,6	87,9	88,3
Dimensi pangan	94,8	93,4	92,5	88,5
Dimensi pendidikan	35,3	34,1	36,5	33,8
Dimensi perlindungan sosial	69,2	64,1	57,9	57,4
IKPS	69,0	69,9	70,3	69,3

Lampiran 2.26
Capaian IKPS Provinsi Sulawesi Tengah
Menurut Komponen Penyusun, 2018-2021

Indikator/Dimensi/IKPS	Indeks			
	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Imunisasi	53,3	60,0	64,0	76,5
Penolong persalinan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan	70,3	78,1	77,2	81,3
KB modern	69,8	67,7	67,0	67,3
ASI eksklusif	52,4	71,6	77,5	82,4
MP ASI	76,5	77,0	79,6	79,3
Air minum layak	85,3	83,4	84,6	88,5
Sanitasi layak	67,5	71,9	74,6	76,1
Ketidakcukupan konsumsi pangan	88,4	86,0	85,2	82,3
PAUD	46,4	41,8	43,8	41,2
Kepemilikan JKN/Jamkesda	59,5	61,2	68,7	67,6
Penerima KPS/KKS atau bantuan pangan	76,8	69,2	39,9	39,2
Dimensi kesehatan	64,5	68,6	69,4	75,0
Dimensi gizi	64,5	74,3	78,5	80,8
Dimensi perumahan	76,4	77,7	79,6	82,3
Dimensi pangan	88,4	86,0	85,2	82,3
Dimensi pendidikan	46,4	41,8	43,8	41,2
Dimensi perlindungan sosial	68,2	65,2	54,3	53,4
IKPS	68,1	68,9	68,5	69,2

Lampiran 2.27
Capaian IKPS Provinsi Sulawesi Selatan
Menurut Komponen Penyusun, 2018-2021

Indikator/Dimensi/IKPS	Indeks			
	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Imunisasi	67,5	64,6	68,2	76,0
Penolong persalinan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan	83,5	87,9	92,7	95,3
KB modern	58,7	58,0	58,3	56,7
ASI eksklusif	65,2	88,1	95,3	95,5
MP ASI	78,1	77,0	73,6	73,3
Air minum layak	88,1	89,4	90,8	91,2
Sanitasi layak	84,4	87,8	89,0	91,6
Ketidakcukupan konsumsi pangan	89,7	87,3	83,1	86,8
PAUD	35,7	33,0	35,3	32,7
Kepemilikan JKN/Jamkesda	69,5	72,3	76,1	76,0
Penerima KPS/KKS atau bantuan pangan	64,3	51,7	38,4	45,9
Dimensi kesehatan	69,9	70,1	73,1	76,0
Dimensi gizi	71,7	82,6	84,4	84,4
Dimensi perumahan	86,3	88,6	89,9	91,4
Dimensi pangan	89,7	87,3	83,1	86,8
Dimensi pendidikan	35,7	33,0	35,3	32,7
Dimensi perlindungan sosial	66,9	62,0	57,2	61,0
IKPS	70,0	70,6	70,5	72,0

Lampiran 2.28
Capaian IKPS Provinsi Sulawesi Tenggara
Menurut Komponen Penyusun, 2018-2021

Indikator/Dimensi/IKPS	Indeks			
	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Imunisasi	47,0	65,2	67,6	78,3
Penolong persalinan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan	47,7	54,9	56,6	57,3
KB modern	59,4	57,8	56,6	54,8
ASI eksklusif	43,7	69,7	75,6	78,2
MP ASI	75,9	74,6	72,5	75,2
Air minum layak	88,5	89,7	92,5	91,9
Sanitasi layak	73,6	79,7	82,4	85,6
Ketidakcukupan konsumsi pangan	88,2	85,4	83,2	81,4
PAUD	34,6	38,5	38,5	36,3
Kepemilikan JKN/Jamkesda	61,3	67,1	72,9	72,2
Penerima KPS/KKS atau bantuan pangan	79,7	59,9	41,8	53,2
Dimensi kesehatan	51,4	59,3	60,3	63,5
Dimensi gizi	59,8	72,2	74,1	76,7
Dimensi perumahan	81,0	84,7	87,4	88,8
Dimensi pangan	88,2	85,4	83,2	81,4
Dimensi pendidikan	34,6	38,5	38,5	36,3
Dimensi perlindungan sosial	70,5	63,5	57,4	62,7
IKPS	64,3	67,3	66,8	68,2

Lampiran 2.29
Capaian IKPS Provinsi Gorontalo
Menurut Komponen Penyusun, 2018-2021

Indikator/Dimensi/IKPS	Indeks			
	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Imunisasi	67,5	73,2	77,1	80,0
Penolong persalinan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan	86,6	88,7	88,8	89,3
KB modern	75,5	75,4	72,9	70,7
ASI eksklusif	52,7	63,7	70,3	65,9
MP ASI	59,7	72,0	59,1	68,1
Air minum layak	93,4	94,2	94,2	94,6
Sanitasi layak	64,6	74,6	75,7	78,6
Ketidakcukupan konsumsi pangan	80,8	87,1	82,8	75,3
PAUD	55,8	55,0	53,9	55,8
Kepemilikan JKN/Jamkesda	74,3	77,9	79,7	78,3
Penerima KPS/KKS atau bantuan pangan	81,5	60,6	58,5	57,7
Dimensi kesehatan	76,5	79,1	79,6	80,0
Dimensi gizi	56,2	67,9	64,7	67,0
Dimensi perumahan	79,0	84,4	84,9	86,6
Dimensi pangan	80,8	87,1	82,8	75,3
Dimensi pendidikan	55,8	55,0	53,9	55,8
Dimensi perlindungan sosial	77,9	69,2	69,1	68,0
IKPS	71,0	73,8	72,5	72,1

Lampiran 2.30
Capaian IKPS Provinsi Sulawesi Barat
Menurut Komponen Penyusun, 2018-2021

Indikator/Dimensi/IKPS	Indeks			
	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Imunisasi	55,5	61,4	55,5	62,5
Penolong persalinan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan	69,6	78,6	81,4	83,2
KB modern	62,2	57,4	56,8	60,0
ASI eksklusif	77,2	91,0	89,4	93,4
MP ASI	93,0	86,4	76,5	94,9
Air minum layak	72,0	71,5	72,7	78,4
Sanitasi layak	67,4	73,4	77,1	80,1
Ketidakcukupan konsumsi pangan	83,0	88,7	84,7	82,0
PAUD	47,3	46,0	47,1	48,2
Kepemilikan JKN/Jamkesda	81,4	82,2	85,1	83,0
Penerima KPS/KKS atau bantuan pangan	86,3	74,2	41,4	53,4
Dimensi kesehatan	62,4	65,8	64,6	68,6
Dimensi gizi	85,1	88,7	83,0	94,2
Dimensi perumahan	69,7	72,4	74,9	79,2
Dimensi pangan	83,0	88,7	84,7	82,0
Dimensi pendidikan	47,3	46,0	47,1	48,2
Dimensi perlindungan sosial	83,9	78,2	63,3	68,2
IKPS	71,9	73,3	69,6	73,4

Lampiran 2.31
Capaian IKPS Provinsi Maluku
Menurut Komponen Penyusun, 2018-2021

Indikator/Dimensi/IKPS	Indeks			
	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Imunisasi	37,7	55,2	59,7	66,8
Penolong persalinan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan	33,8	39,7	43,4	45,9
KB modern	47,3	47,7	50,1	43,6
ASI eksklusif	45,5	70,7	71,5	76,6
MP ASI	64,4	72,7	67,3	68,3
Air minum layak	92,5	90,8	91,7	93,2
Sanitasi layak	69,9	70,0	75,1	76,8
Ketidakcukupan konsumsi pangan	43,2	43,3	40,8	50,6
PAUD	34,2	32,7	38,0	35,4
Kepemilikan JKN/Jamkesda	52,3	58,2	60,1	57,5
Penerima KPS/KKS atau bantuan pangan	97,9	69,6	40,3	40,3
Dimensi kesehatan	39,6	47,5	51,0	52,1
Dimensi gizi	54,9	71,7	69,4	72,5
Dimensi perumahan	81,2	80,4	83,4	85,0
Dimensi pangan	43,2	43,3	40,8	50,6
Dimensi pendidikan	34,2	32,7	38,0	35,4
Dimensi perlindungan sosial	75,1	63,9	50,2	48,9
IKPS	54,7	56,6	55,5	57,4

Lampiran 2.32
Capaian IKPS Provinsi Maluku Utara
Menurut Komponen Penyusun, 2018-2021

Indikator/Dimensi/IKPS	Indeks			
	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Imunisasi	44,8	48,1	50,5	57,6
Penolong persalinan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan	41,0	57,6	62,2	64,6
KB modern	65,3	62,2	63,8	61,1
ASI eksklusif	80,4	80,4	78,0	82,5
MP ASI	66,1	74,5	74,2	69,7
Air minum layak	85,0	85,0	86,9	88,7
Sanitasi layak	69,1	72,5	76,0	77,1
Ketidakcukupan konsumsi pangan	48,9	40,5	40,9	51,9
PAUD	39,2	42,5	42,1	43,1
Kepemilikan JKN/Jamkesda	62,7	66,5	71,1	68,4
Penerima KPS/KKS atau bantuan pangan	63,3	42,2	17,1	22,2
Dimensi kesehatan	50,4	56,0	58,8	61,1
Dimensi gizi	73,3	77,5	76,1	76,1
Dimensi perumahan	77,0	78,8	81,4	82,9
Dimensi pangan	48,9	40,5	40,9	51,9
Dimensi pendidikan	39,2	42,5	42,1	43,1
Dimensi perlindungan sosial	63,0	54,3	44,1	45,3
IKPS	58,6	58,3	57,2	60,1

Lampiran 2.33
Capaian IKPS Provinsi Papua Barat
Menurut Komponen Penyusun, 2018-2021

Indikator/Dimensi/IKPS	Indeks			
	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Imunisasi	46,4	52,9	56,2	62,5
Penolong persalinan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan	59,5	69,0	73,9	72,8
KB modern	43,7	45,6	43,8	42,2
ASI eksklusif	43,8	83,0	74,9	73,5
MP ASI	73,7	68,0	69,9	67,4
Air minum layak	83,2	81,8	79,6	81,7
Sanitasi layak	76,0	76,4	78,7	77,9
Ketidakcukupan konsumsi pangan	64,8	68,0	61,5	59,0
PAUD	30,4	31,0	29,4	27,4
Kepemilikan JKN/Jamkesda	70,0	72,1	74,0	71,9
Penerima KPS/KKS atau bantuan pangan	73,7	75,4	25,1	30,2
Dimensi kesehatan	49,8	55,9	58,0	59,2
Dimensi gizi	58,7	75,5	72,4	70,4
Dimensi perumahan	79,6	79,1	79,1	79,8
Dimensi pangan	64,8	68,0	61,5	59,0
Dimensi pendidikan	30,4	31,0	29,4	27,4
Dimensi perlindungan sosial	71,9	73,7	49,5	51,1
IKPS	59,2	63,9	58,3	57,8

Lampiran 2.34
Capaian IKPS Provinsi Papua
Menurut Komponen Penyusun, 2018-2021

Indikator/Dimensi/IKPS	Indeks			
	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Imunisasi	33,8	38,6	38,9	55,1
Penolong persalinan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan	52,3	60,6	62,1	65,9
KB modern	22,3	20,6	19,0	17,5
ASI eksklusif	54,4	98,8	93,2	92,6
MP ASI	77,5	68,8	68,8	69,5
Air minum layak	62,4	60,8	62,7	64,9
Sanitasi layak	37,1	38,3	40,3	40,8
Ketidakcukupan konsumsi pangan	36,1	36,4	47,5	37,7
PAUD	14,6	13,0	12,7	11,7
Kepemilikan JKN/Jamkesda	81,3	83,2	83,6	84,5
Penerima KPS/KKS atau bantuan pangan	72,1	51,7	10,5	13,9
Dimensi kesehatan	36,1	39,9	40,0	46,2
Dimensi gizi	65,9	83,8	81,0	81,0
Dimensi perumahan	49,8	49,6	51,5	52,9
Dimensi pangan	36,1	36,4	47,5	37,7
Dimensi pendidikan	14,6	13,0	12,7	11,7
Dimensi perlindungan sosial	76,7	67,4	47,1	49,2
IKPS	46,6	48,3	46,6	46,4

Lampiran 2.35
Kategori IKPS Menurut Provinsi, 2020-2021

Kabupaten/Kota	2020	2021
(1)	(2)	(3)
Aceh	Sedang	Sedang
Sumatera Utara	Sedang	Sedang
Sumatera Barat	Sedang	Sedang
R i a u	Sedang	Sedang
J a m b i	Sedang	Sedang
Sumatera Selatan	Sedang	Sedang
Bengkulu	Sedang	Sedang
Lampung	Sedang	Tinggi
Kepulauan Bangka Belitung	Sedang	Sedang
Kepulauan Riau	Sedang	Sedang
DKI Jakarta	Tinggi	Tinggi
Jawa Barat	Sedang	Sedang
Jawa Tengah	Tinggi	Tinggi
DI Yogyakarta	Tinggi	Tinggi
Jawa Timur	Tinggi	Tinggi
Banten	Sedang	Sedang
B a l i	Tinggi	Tinggi
Nusa Tenggara Barat	Tinggi	Tinggi
Nusa Tenggara Timur	Sedang	Sedang
Kalimantan Barat	Sedang	Sedang
Kalimantan Tengah	Sedang	Sedang
Kalimantan Selatan	Tinggi	Tinggi
Kalimantan Timur	Sedang	Sedang
Kalimantan Utara	Sedang	Sedang
Sulawesi Utara	Sedang	Sedang
Sulawesi Tengah	Sedang	Sedang
Sulawesi Selatan	Sedang	Tinggi
Sulawesi Tenggara	Sedang	Sedang
Gorontalo	Tinggi	Tinggi
Sulawesi Barat	Sedang	Tinggi
Maluku	Rendah	Rendah
Maluku Utara	Rendah	Sedang
Papua Barat	Rendah	Rendah
Papua	Rendah	Rendah*

Catatan: *Dimasukkan ke dalam kategori rendah karena nilai IKPS di bawah nilai batas bawah kategori rendah.

Lampiran 3.1
Capaian IKPS Kabupaten/Kota dengan RSE Kurang dari 25 Persen
untuk Seluruh Indikator Penyusun IKPS Tahun 2020-2021, 2020-2021

Kabupaten/Kota	2020	2021
(1)	(2)	(3)
1114. Kab. Aceh Tamiang	69,7	71,4
1205. Kab. Tapanuli Utara	60,9	58,2
1208. Kab. Asahan	63,8	62,7
1210. Kab. Dairi	55,6	60,4
1211. Kab. Karo	62,4	63,9
1215. Kab. Humbang Hasundutan	65,6	71,0
1219. Kab. Batu Bara	61,9	60,3
1278. Kota Gunungsitoli	60,2	61,7
1302. Kab. Pesisir Selatan	68,3	68,1
1303. Kab. Solok	63,6	55,9
1304. Kab. Sijunjung	62,2	61,4
1311. Kab. Dharmasraya	65,7	65,0
1372. Kota Solok	74,8	74,6
1401. Kab. Kuantan Singingi	63,9	67,0
1402. Kab. Indragiri Hulu	65,2	62,0
1403. Kab. Indragiri Hilir	51,6	54,1
1408. Kab. Bengkalis	62,3	62,6
1473. Kota Dumai	60,7	59,6
1504. Kab. Batang Hari	64,4	66,7
1508. Kab. Tebo	61,6	61,5
1509. Kab. Bungo	58,4	59,1
1602. Kab. Ogan Komering Ilir	60,1	56,8
1603. Kab. Muara Enim	66,2	67,4
1609. Kab. Ogan Komering Ulu Timur	62,9	61,7
1610. Kab. Ogan Ilir	65,5	64,0
1671. Kota Palembang	63,7	62,4
1673. Kota Pagar Alam	61,0	63,5
1674. Kota Lubuklinggau	71,2	69,4
1701. Kab. Bengkulu Selatan	65,9	67,5
1702. Kab. Rejang Lebong	57,4	58,1
1704. Kab. Kaur	67,9	66,9
1705. Kab. Seluma	64,9	63,9
1706. Kab. Mukomuko	66,0	68,1
1707. Kab. Lebong	58,5	62,3
1708. Kab. Kepahiang	64,1	61,2
1709. Kab. Bengkulu Tengah	64,0	69,3
1801. Kab. Lampung Barat	63,3	64,0
1802. Kab. Tanggamus	72,4	69,0
1803. Kab. Lampung Selatan	66,9	74,8
1804. Kab. Lampung Timur	78,6	70,0
1805. Kab. Lampung Tengah	62,7	73,2
1806. Kab. Lampung Utara	69,3	69,0
1807. Kab. Way Kanan	62,6	67,0
1808. Kab. Tulangbawang	63,1	62,7
1810. Kab. Pringsewu	67,2	75,4
1811. Kab. Mesuji	62,6	67,4
1812. Kab. Tulang Bawang Barat	56,4	58,8

Lampiran 3.1 (Lanjutan)

Kabupaten/Kota	2020	2021
(1)	(2)	(3)
1813. Kab. Pesisir Barat	59,8	65,5
1871. Kota Bandar Lampung	71,0	75,0
1872. Kota Metro	76,4	79,2
1901. Kab. Bangka	62,7	67,1
2102. Kab. Bintan	64,1	65,9
2104. Kab. Lingga	60,8	66,4
2171. Kota Batam	61,3	61,0
2172. Kota Tanjung Pinang	69,2	67,0
3101. Kab. Kepulauan Seribu	71,4	74,9
3171. Kota Jakarta Selatan	67,5	72,0
3174. Kota Jakarta Barat	68,2	73,1
3175. Kota Jakarta Utara	67,7	64,0
3201. Kab. Bogor	60,3	62,6
3202. Kab. Sukabumi	67,7	63,9
3203. Kab. Cianjur	62,2	62,7
3204. Kab. Bandung	67,2	67,0
3205. Kab. Garut	61,7	61,5
3206. Kab. Tasikmalaya	64,6	66,8
3207. Kab. Ciamis	68,4	71,4
3208. Kab. Kuningan	73,0	74,6
3209. Kab. Cirebon	68,9	66,1
3210. Kab. Majalengka	72,9	72,2
3211. Kab. Sumedang	71,4	71,7
3214. Kab. Purwakarta	62,7	59,8
3216. Kab. Bekasi	65,6	57,8
3217. Kab. Bandung Barat	66,9	68,1
3218. Kab. Pangandaran	69,8	71,9
3271. Kota Bogor	66,3	67,4
3272. Kota Sukabumi	65,3	68,9
3273. Kota Bandung	68,4	67,0
3274. Kota Cirebon	76,0	70,7
3275. Kota Bekasi	69,5	66,2
3276. Kota Depok	72,0	70,8
3277. Kota Cimahi	67,8	71,5
3278. Kota Tasikmalaya	70,9	66,9
3301. Kab. Cilacap	73,7	73,3
3302. Kab. Banyumas	75,3	76,9
3303. Kab. Purbalingga	76,7	77,1
3304. Kab. Banjarnegara	71,2	70,1
3305. Kab. Kebumen	79,0	75,4
3306. Kab. Purworejo	77,7	74,4
3307. Kab. Wonosobo	77,6	78,0
3308. Kab. Magelang	79,4	78,0
3309. Kab. Boyolali	76,1	76,6
3310. Kab. Klaten	80,1	78,7
3311. Kab. Sukoharjo	75,1	74,6
3312. Kab. Wonogiri	73,5	72,6
3313. Kab. Karanganyar	77,2	75,8
3314. Kab. Sragen	76,3	72,3

Lampiran 3.1 (Lanjutan)

Kabupaten/Kota	2020	2021
(1)	(2)	(3)
3315. Kab. Grobogan	79,0	81,3
3316. Kab. Blora	75,9	75,2
3317. Kab. Rembang	85,4	82,2
3318. Kab. Pati	79,1	75,1
3320. Kab. Jepara	67,4	73,0
3321. Kab. Demak	77,9	82,3
3322. Kab. Semarang	76,6	82,7
3323. Kab. Temanggung	79,2	78,2
3324. Kab. Kendal	78,2	77,4
3325. Kab. Batang	71,8	74,5
3326. Kab. Pekalongan	74,6	75,4
3327. Kab. Pemasang	71,0	70,2
3328. Kab. Tegal	74,5	72,8
3329. Kab. Brebes	71,8	76,5
3371. Kota Magelang	81,2	76,4
3373. Kota Salatiga	79,6	79,9
3374. Kota Semarang	78,0	75,7
3375. Kota Pekalongan	72,1	72,8
3376. Kota Tegal	76,4	73,2
3401. Kab. Kulon Progo	86,0	88,7
3403. Kab. Gunung Kidul	85,8	88,0
3404. Kab. Sleman	81,3	80,3
3501. Kab. Pacitan	63,9	69,7
3503. Kab. Trenggalek	69,8	76,1
3505. Kab. Blitar	70,9	74,7
3506. Kab. Kediri	76,9	77,0
3507. Kab. Malang	69,5	75,0
3508. Kab. Lumajang	69,5	78,9
3509. Kab. Jember	70,6	71,2
3511. Kab. Bondowoso	74,9	75,2
3515. Kab. Sidoarjo	70,8	73,8
3518. Kab. Nganjuk	81,4	80,7
3522. Kab. Bojonegoro	84,7	83,7
3523. Kab. Tuban	80,7	85,0
3524. Kab. Lamongan	82,6	79,1
3525. Kab. Gresik	78,7	73,6
3572. Kota Blitar	83,1	79,3
3573. Kota Malang	75,0	71,9
3575. Kota Pasuruan	82,2	73,7
3578. Kota Surabaya	71,5	67,8
3601. Kab. Pandeglang	57,3	57,3
3603. Kab. Tangerang	61,5	63,1
3671. Kota Tangerang	64,6	67,1
3672. Kota Cilegon	72,5	73,2
3673. Kota Serang	63,7	63,5
5104. Kab. Gianyar	74,7	74,6
5201. Kab. Lombok Barat	75,3	71,4
5202. Kab. Lombok Tengah	68,0	72,0
5203. Kab. Lombok Timur	72,2	75,3
5206. Kab. Bima	70,6	71,7

Lampiran 3.1 (Lanjutan)

Kabupaten/Kota	2020	2021
(1)	(2)	(3)
5207. Kab. Sumbawa Barat	81,1	81,1
5208. Kab. Lombok Utara	74,7	75,6
5272. Kota Bima	74,3	77,8
5301. Kab. Sumba Barat	72,0	71,7
5302. Kab. Sumba Timur	67,8	71,0
5303. Kab. Kupang	66,5	64,2
5304. Kab. Timor Tengah Selatan	57,4	59,2
5305. Kab. Timor Tengah Utara	62,9	70,6
5306. Kab. Belu	66,7	67,7
5308. Kab. Lembata	75,1	73,8
5309. Kab. Flores Timur	72,5	69,2
5310. Kab. Sikka	67,5	74,9
5312. Kab. Ngada	69,9	67,4
5313. Kab. Manggarai	68,7	68,8
5314. Kab. Rote Ndao	66,3	64,8
5315. Kab. Manggarai Barat	65,9	69,0
5316. Kab. Sumba Tengah	70,3	73,3
5317. Kab. Sumba Barat Daya	54,0	57,6
5318. Kab. Nagekeo	66,2	68,9
5319. Kab. Manggarai Timur	59,1	66,7
5320. Kab. Sabu Raijua	72,6	68,8
5371. Kota Kupang	66,6	64,5
6101. Kab. Sumbas	63,3	67,2
6103. Kab. Landak	58,9	61,5
6109. Kab. Sekadau	55,3	56,6
6110. Kab. Melawi	56,0	57,4
6304. Kab. Barito Kuala	66,4	66,2
6307. Kab. Hulu Sungai Tengah	73,9	76,9
6309. Kab. Tabalong	71,5	71,2
6401. Kab. Paser	63,8	66,3
6403. Kab. Kutai Kartanegara	60,3	61,4
6409. Kab. Penajam Paser Utara	69,1	73,2
6471. Kota Balikpapan	68,9	67,6
6472. Kota Samarinda	65,0	67,6
6474. Kota Bontang	79,7	75,1
6501. Kab. Malinau	70,1	64,5
6504. Kab. Nunukan	66,5	67,5
6571. Kota Tarakan	64,0	67,6
7101. Kab. Bolaang Mongondow	61,6	65,2
7107. Kab. Bolaang Mongondow Utara	69,7	68,4
7109. Kab. Minahasa Tenggara	65,4	69,5
7110. Kab. Bolaang Mongondow Selatan	66,8	69,6
7201. Kab. Banggai Kepulauan	66,6	64,1
7202. Kab. Banggai	63,6	69,8
7203. Kab. Morowali	72,3	75,1
7204. Kab. Poso	74,1	72,4
7205. Kab. Donggala	60,0	59,1
7206. Kab. Toli-Toli	61,6	60,8
7208. Kab. Parigi Moutong	65,8	67,9

Lampiran 3.1 (Lanjutan)

Kabupaten/Kota	2020	2021
(1)	(2)	(3)
7210. Kab. Sigi	60,0	60,3
7212. Kab. Morowali Utara	67,1	73,6
7304. Kab. Jeneponto	67,2	71,1
7305. Kab. Takalar	71,7	72,5
7306. Kab. Gowa	70,9	68,2
7307. Kab. Sinjai	71,7	79,8
7308. Kab. Maros	67,6	65,5
7310. Kab. Barru	70,8	69,4
7311. Kab. Bone	70,1	73,6
7312. Kab. Soppeng	74,8	73,1
7313. Kab. Wajo	70,2	67,8
7314. Kab. Sidenreng Rappang	66,5	65,1
7316. Kab. Enrekang	70,1	75,3
7317. Kab. Luwu	65,7	68,6
7318. Kab. Tana Toraja	63,2	67,3
7322. Kab. Luwu Utara	68,9	71,3
7325. Kab. Luwu Timur	66,0	68,5
7326. Kab. Toraja Utara	64,3	67,6
7371. Kota Makassar	65,5	63,1
7403. Kab. Konawe	63,2	63,6
7404. Kab. Kolaka	59,7	61,3
7405. Kab. Konawe Selatan	62,9	63,6
7406. Kab. Bombana	66,4	64,6
7408. Kab. Kolaka Utara	65,8	71,0
7409. Kab. Buton Utara	71,9	68,5
7410. Kab. Konawe Utara	61,4	69,6
7472. Kota Baubau	68,3	69,2
7501. Kab. Boalemo	69,9	79,6
7601. Kab. Majene	76,0	77,3
7602. Kab. Polewali Mandar	71,5	76,2
7603. Kab. Mamasa	62,4	66,0
7604. Kab. Mamuju	63,3	65,4
8103. Kab. Maluku Tengah	55,3	58,7
8104. Kab. Buru	61,1	64,2
8106. Kab. Seram Bagian Barat	55,6	55,2
8108. Kab. Maluku Barat Daya	66,0	70,8
8172. Kota Tual	63,6	68,6
8272. Kota Tidore Kepulauan	70,8	67,8
9102. Kab. Kaimana	57,7	59,3
9104. Kab. Teluk Bintuni	62,8	65,3

Lampiran 3.2
Capaian IKPS Kota Balikpapan
Menurut Komponen Penyusun, 2020-2021

Tahun 2020

Indikator/Dimensi/IKPS	Estimasi	RSE Estimasi	Indeks	CI 95% dari Indeks	
				Batas Bawah	Batas Atas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Imunisasi	73,5	9,7	81,6	64,0	94,4
Penolong persalinan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan KB modern	99,4	0,6	99,4	95,8	99,9
ASI eksklusif	48,5	6,2	60,6	53,3	68,0
MP ASI	82,2	12,5	100,0	67,6	100,0
Air minum layak	66,2	9,3	82,8	66,8	96,2
Sanitasi layak	98,2	1,1	98,2	94,7	99,4
PAUD	90,9	2,6	90,9	85,0	94,6
Kepemilikan JKN/Jamkesda	24,0	16,4	26,7	19,1	36,0
Penerima KPS/KKS atau bantuan pangan	79,6	2,8	79,6	74,9	83,6
Dimensi kesehatan	18,1	19,4	22,6	15,3	32,5
Dimensi gizi			80,5	74,2	85,6
Dimensi perumahan			91,4	74,8	97,4
Dimensi pendidikan			94,6	91,3	96,6
Dimensi perlindungan sosial			26,7	19,1	35,9
IKPS			51,1	46,3	55,9
			68,9	65,5	72,0

Tahun 2021

Indikator/Dimensi/IKPS	Estimasi	RSE Estimasi	Indeks	CI 95% dari Indeks	
				Batas Bawah	Batas Atas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Imunisasi	74,6	9,9	82,9	64,2	95,9
Penolong persalinan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan KB modern	98,5	1,5	98,5	90,0	99,8
ASI eksklusif	43,9	6,6	54,8	47,9	62,0
MP ASI	92,9	7,8	100,0	75,8	100,0
Air minum layak	71,9	7,4	89,8	75,6	100,0
Sanitasi layak	99,7	0,2	99,7	98,9	99,9
PAUD	93,3	2,5	93,3	86,8	96,7
Kepemilikan JKN/Jamkesda	19,6	15,8	21,8	15,8	29,3
Penerima KPS/KKS atau bantuan pangan	79,3	3,3	79,3	73,7	83,9
Dimensi kesehatan	10,6	22,5	13,3	8,4	20,4
Dimensi gizi			78,8	72,2	84,1
Dimensi perumahan			94,9	76,9	99,1
Dimensi pendidikan			96,5	93,3	98,2
Dimensi perlindungan sosial			21,8	15,8	29,2
IKPS			46,3	42,3	50,3
			67,6	64,9	70,3

Catatan: *Jika 25 persen \leq RSE \leq 50 persen, penggunaan nilai harus dilakukan dengan berhati-hati.

**Jika RSE > 50 persen, penggunaan nilai dianggap tidak akurat.

Lampiran 3.3
Capaian IKPS Kabupaten Mahakam Hulu
Menurut Komponen Penyusun, 2020-2021

Tahun 2020

Indikator/Dimensi/IKPS	Estimasi	RSE Estimasi	Indeks	CI 95% dari Indeks	
				Batas Bawah	Batas Atas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Imunisasi	80,9	7,4	89,8	73,8	100,0
Penolong persalinan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan	89,0	4,0	89,0	80,1	94,2
KB modern	54,0	7,6	67,5	57,4	77,3
ASI eksklusif	15,2	57,2**	19,0	5,7	50,3
MP ASI	59,8	10,2	74,7	59,4	88,7
Air minum layak	31,4	13,1	31,4	24,0	39,9
Sanitasi layak	70,1	5,5	70,1	62,2	77,0
PAUD	32,1	13,9	35,7	26,6	46,1
Kepemilikan JKN/Jamkesda	91,2	1,5	91,2	88,0	93,6
Penerima KPS/KKS atau bantuan pangan	4,2	37,3*	5,2	2,5	10,9
Dimensi kesehatan			82,1	75,3	87,4
Dimensi gizi			46,9	33,4	60,8
Dimensi perumahan			50,7	45,3	56,2
Dimensi pendidikan			35,7	26,5	46,0
Dimensi perlindungan sosial			48,2	45,7	50,8
IKPS			52,7	48,9	56,5

Tahun 2021

Indikator/Dimensi/IKPS	Estimasi	RSE Estimasi	Indeks	CI 95% dari Indeks	
				Batas Bawah	Batas Atas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Imunisasi	72,2	12,4	80,3	57,9	95,7
Penolong persalinan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan	80,8	6,3	80,8	68,8	88,9
KB modern	58,6	7,6	73,3	62,0	83,8
ASI eksklusif	49,3	30,0*	61,6	29,2	94,5
MP ASI	65,0	15,5	81,3	54,7	100,0
Air minum layak	49,4	13,0	49,4	37,1	61,7
Sanitasi layak	91,7	2,5	91,7	85,9	95,2
PAUD	51,6	18,4	57,3	37,3	76,9
Kepemilikan JKN/Jamkesda	89,8	2,4	89,8	84,9	93,2
Penerima KPS/KKS atau bantuan pangan	38,5	34,7*	48,2	21,4	81,9
Dimensi kesehatan			78,1	69,0	85,1
Dimensi gizi			71,4	44,8	88,5
Dimensi perumahan			70,6	63,5	76,7
Dimensi pendidikan			57,3	36,2	76,1
Dimensi perlindungan sosial			69,0	49,8	83,3
IKPS			69,3	62,0	75,7

Catatan: *Jika 25 persen \leq RSE \leq 50 persen, penggunaan nilai harus dilakukan dengan berhati-hati.

**Jika RSE > 50 persen, penggunaan nilai dianggap tidak akurat.

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK

Jl. Dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10710

Telp: (021) 3841195, 3842508, 3810291-4, Fax: (021) 3857046

Email: bpshq@bps.go.id Homepage: <http://bps.go.id>